

**ANALISIS PENERAPAN PSAK No. 45 TENTANG PELAPORAN
KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA PADA RUMAH SAKIT
BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM
(Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh
Ida Bagus Made Cahya Restu Aji
12812144044

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK No. 45 TENTANG PELAPORAN
KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA PADA RUMAH SAKIT
BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM
(Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta)**

SKRIPSI

Oleh :

Ida Bagus Made Cahya Restu Aji

12812144044

Telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal 23 Februari 2017



Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui,

Dosen Pembimbing

Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA.

NIP. 196306241990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul :

**“ANALISIS PENERAPAN PSAK No. 45 TENTANG PELAPORAN
KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA PADA RUMAH SAKIT
BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM
(Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta)”**

yang disusun oleh :

IDA BAGUS MADE CAHYA RESTU AJI

NIM. 12812144044

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 8 Maret 2017
dan dinyatakan lulus.

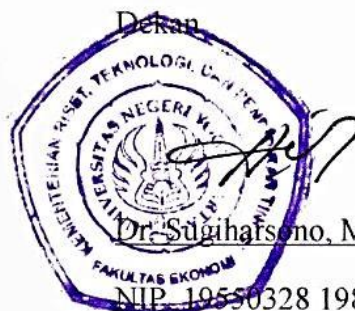
DEWAN PENGUJI

Nama	Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
RR. Indah Mustikawati, M.Si., Ak., CA.	Ketua Penguji		14/03 '17
Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA.	Sekretaris		14/03 2017
Dr. Denies Priantinah, M.Si., Ak., CA.	Penguji Utama		13/03 2017

Yogyakarta, 15 Maret 2017

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta



Dr. Sugihartono, M.Si

NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ida Bagus Made Cahya Restu Aji

NIM : 12812144044

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 15 Maret 2017

Penulis



Ida Bagus Made Cahya Restu Aji

NIM. 12812144044

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetap bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”.

(Q.S Al-Insyirah ayat 6-8)

“Dum Spiro Spero”

“While I Breathe, I Hope”

“Selama saya masih bernapas, saya tetap berharap”

(Theocritus dan Cicero)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Almh. Dra. Hj. Aswarni Sudjud, M.Sc. (Nenek) Terimakasih atas doa, nasihat, dan pengorbanannya.
2. Ida Bagus Putu Pastika dan Fenty Noor Hidayah (Orang Tua) Terimakasih atas doa, nasihat, dan pengorbanannya.
3. Ida Bagus Putu Surya Restu Aji (Kakak) Terimakasih atas inspirasi dan motivasinya.

**ANALISIS PENERAPAN PSAK No. 45 TENTANG PELAPORAN
KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA PADA RUMAH SAKIT
BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM
(Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta)**

Oleh:

IDA BAGUS MADE CAHYA RESTU AJI
12812144044

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyajian laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengacu pada : (1) PSAK No 45, (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, dan (3) Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 di RSUD Kota Yogyakarta.

Lokasi penelitian ini adalah RSUD Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Wirosaban Barat No 1, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY, dengan subyek penelitian Staf Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan membandingkan antara teori dengan praktik dalam penyusunan laporan keuangan organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada 2 indikator dalam laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45, namun secara umum RSUD Kota Yogyakarta sudah menerapkan PSAK No. 45 dalam laporan keuangannya dengan baik. (2) RSUD Kota Yogyakarta telah menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku bagi BLU yaitu Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.

Kata Kunci: Penerapan PSAK No.45, Pelaporan Keuangan, Organisasi Nirlaba, Badan Layanan Umum, Rumah Sakit.

**ANALYSIS APPLICATION OF PSAK NO 45 ABOUT FINANCIAL REPORT
OF NONPROFIT ORGANIZATION FOR HOSPITAL IN PUBLIC SERVICE
AGENCY**

(The Study in Regional General Hospital of Yogyakarta)

By :

IDA BAGUS MADE CAHYA RESTU AJI
12812144044

ABSTRACT

This study aimed to describe the financial statements of Regional Hospital (RSUD) of Yogyakarta based on (1) PSAK No. 45, (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, and (3) Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 at The Regional General Hospital of Yogyakarta.

The study was conducted in Regional General Hospital of Yogyakarta which located at West Wirosaban Street No 1, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, DIY with research subject is finance and accounting staff division of Regional General Hospital of Yogyakarta. Data collection techniques were used that through documentations and interviews. Data analysis method used in this study is descriptive qualitative by comparing the theories and the practice in the preparation of financial statements organization.

The results showed that (1) there are 2 indicators in the financial statements of Regional General Hospital of Yogyakarta do not accordance with PSAK No. 45, but in generally, Regional General Hospital of Yogyakarta has applied PSAK No. 45 in it's financial statements well; (2) Regional General Hospital of Yogyakarta has provided the financial statements based on regulation for public service agency (BLU) that is the guidelines of accounting and financial reporting of public service agency according to Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 and Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.

Keyword : The Application of PSAK No. 45, Financial Reporting, Non Profit Organization, Public Service Agency, Hospital

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta)”. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini adalah berkat dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

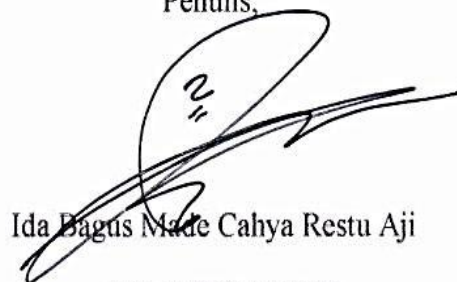
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
3. Bapak Alm. Drs. Ngadirin Setiawan, M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa studi.
4. Bapak Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Dr. Denies Priantinah, M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Narasumber tugas akhir skripsi yang telah memberikan saran dan ilmu.
6. Ibu drg. Hj. RR. Tuty Setyowati, MM selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penulis selama penelitian.

7. Bapak Sony Haksomo, S.E., selaku Kepala Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian dan membantu penulis selama penelitian.
8. Bapak Bambang Nugroho, M.Sc., M.Ec., Dev.Ak., selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang membangun. Dan akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 15 Maret 2017

Penulis,



Ida Bagus Made Cahya Restu Aji

NIM 12812144044

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
 BAB II KAJIAN TEORI	 14
A. Landasan Teori	14
1. Standar Akuntansi Keuangan	14
2. Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba.....	16
3. Pengertian Badan Layanan Umum	26
4. Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum	29
5. Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	29
6. Rumah Sakit Pemerintah Berstatus Badan Layanan Umum.....	31
B. Penelitian yang Relevan	32
C. Kerangka Berpikir	34
D. Pertanyaan Penelitian.....	35
 BAB III METODE PENELITIAN	 39
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
B. Jenis dan Sumber Data.....	39
1. Jenis Data	39
2. Sumber Data.....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
D. Definisi Operasional Variabel	41

E. Instrumen Penelitian	41
F. Metode Pengumpulan Data.....	42
G. Metode Analisis	43
H. Analisis Kualitatif.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Penelitian.....	46
B. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	46
1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	46
2. Gambaran Singkat Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	47
3. Struktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	49
4. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	49
5. Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.....	49
6. Tujuan Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	50
7. Nilai-nilai Dasar Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	50
8. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	51
C. Hasil Analisis.....	51
D. Pembahasan	71
E. Keterbatasan Penelitian	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Analisis Komponen Pelaporan yang Digunakan RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45	51
2. Analisis Komponen Pelaporan yang Digunakan RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008	51
3. Analisis Komponen Pelaporan yang Digunakan RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.....	52
4. Analisis Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45	52
5. Analisis Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008	53
6. Analisis Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.....	54
7. Analisis Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45.....	55
8. Analisis Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008	56
9. Analisis Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.....	57
10. Analisis Perubahan Kelompok Aktiva Bersih RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45	57
11. Analisis Perubahan Kelompok Aktiva Bersih RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008	58

Tabel	Halaman
12. Analisis Perubahan Kelompok Aktiva Bersih RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.....	58
13. Analisis Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45	59
14. Analisis Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008	60
15. Analisis Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.....	61
16. Analisis Informasi Pendapatan dan Beban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45	63
17. Analisis Informasi Pendapatan dan Beban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008	63
18. Analisis Informasi Pendapatan dan Beban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010	64
19. Analisis Informasi Pemberian Jasa RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45	64
20. Analisis Informasi Pemberian Jasa RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008	65
21. Analisis Informasi Pemberian Jasa RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010	66
22. Analisis Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45	66
23. Analisis Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008	68
24. Analisis Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir.....	34
2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Izin Pra Survey	82
2. Surat Permohonan Izin Studi Pendahuluan.....	83
3. Surat Izin Pengambilan Data (Studi Pendahuluan).....	84
4. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Pengambilan Data (Studi Pendahuluan).....	85
5. Surat Izin Penelitian Sekertariat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta	86
6. Surat Izin Penelitian Dinas Perijinan Kota Yogyakarta.....	87
7. Surat Izin Penelitian Direktur RSUD Kota Yogyakarta	88
8. Pedoman Wawancara Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi.....	90
9. Hasil Wawancara Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi	91
10. Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2014.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara, yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, serta akuntabilitas dan transparansi. Semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah.

Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan. Memang menjadi persepsi masyarakat bahwa pemerintah selama ini dinilai sebagai organisasi yang birokratis, lambat, tidak efektif dan tidak efisien. Padahal dalam manajemen modern unit pemerintahan harus profesional, akuntabel dan transparan. Rumah Sakit Pemerintah sebagai salah satu jenis Badan Layanan Umum merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tidak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain

bahwa Rumah Sakit Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien. Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (*profesionalitas*) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri.

Rumah Sakit Pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut. Melalui Keputusan Walikota Yogyakarta No.423/Kep/2007 pada tanggal 12 September 2007, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta telah ditetapkan sebagai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagai rumah sakit pemerintah berstatus Badan Layanan Umum Daerah merupakan layanan jasa yang menyediakan untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu.

Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting. Ditinjau dari *mechanic view* pemerintah sebagai regulator dan sebagai administrator, sedangkan dari *organic view* pemerintah berfungsi sebagai *public service agency* dan sebagai investor. Peranan sebagai regulator dan administrator erat sekali kaitannya dengan birokrasi sedangkan sebagai agen pelayan masyarakat dan sebagai investor harus dinamis dan dapat ditransformasikan menjadi unit yang otonom.

Pola transformasi fungsi tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu *rightsizing (cut the government)*, *corporatization* dan *privatization*. Namun tidak semua kegiatan pemerintah bisa ditransformasikan sebagai unit yang otonom dengan pola di atas. Transformasi fungsi kegiatan sebagai unit yang otonom dapat dilakukan pada berbagai kegiatan, antara lain: kegiatan pelayanan pendidikan, kesehatan masyarakat, administrasi kependudukan, pengolahan data, administrasi kendaraan, pengelolaan dana bergulir, pembinaan olahraga, pemeliharaan jalan, pemungutan pajak dan retribusi, pembinaan calon tenaga kerja, pertamanan dan kebersihan. Sementara itu kegiatan yang tidak bisa ditransformasikan sebagai unit yang otonom antara lain: kegiatan legislasi, pengaturan (regulasi), penetapan kebijakan pelayanan, penganggaran, peradilan, penindakan, dan pertanggungjawaban.

Bermula dari tujuan peningkatan pelayanan publik tersebut diperlukan pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang saat ini bentuk dan modelnya beraneka

macam. Sesuai pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan :

“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas”

Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam pasal 1 angka 1 PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Tujuan dibentuknya BLU adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa :

“Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Kemudian ditegaskan kembali dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa :

“BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat”.

Sedangkan Asas BLU diatur menurut Pasal 3 PP No. 23 Tahun 2005, yaitu :

1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi

induk yang bersangkutan dan tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya.

2. Pejabat BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk.
3. BLU dalam menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
4. Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah.
5. Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Dari uraian definisi, tujuan dan asas BLU, maka dapat terlihat bahwa BLU memiliki suatu karakteristik tertentu, yaitu :

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan Negara.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
3. Tidak mengutamakan pencarian laba.
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi.
5. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk.
6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung.
7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
8. BLU bukan subyek pajak.

Sekalipun BLU dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi, namun terdapat beberapa karakteristik lainnya yang membedakan pengelolaan BLU dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu :

1. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/ daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan.
3. Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
4. Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
5. Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah.

7. Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/ daerah.
8. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang bersangkutan.
9. BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2005.

Apabila dikelompokkan menurut jenisnya Badan Layanan Umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain.
2. BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otoritas pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet).
3. BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM), penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.

Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan bukan bentuknya saja suatu unit pemerintah menjadi BLU yang melayani masyarakat tetapi tingkat pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara yang profesional, efektif dan efisien oleh pengelola unit tersebut dengan otonomi pengelolaan yang akan diberikan.

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian dalam praktik organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk sehingga seringkali sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. Pada beberapa organisasi nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah aset, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU pasal 26 ayat (2) yang berbunyi :

"Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia"

Maka standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi :

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Aktivitas
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasar uraian di atas dan mengingat pentingnya menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi nirlaba bagi *stakeholder* maka penulis dalam penyusunan laporan skripsi mengambil judul "Analisis Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan agar tercapai suatu pembahasan yang terperinci, maka dalam penelitian ini terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan memiliki banyak kegunaan bagi sebuah perusahaan atau lembaga sehingga perlu standar baku dalam penyajian laporan keuangan.
2. Penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai standar yang berlaku menimbulkan bias penafsiran.
3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta termasuk organisasi nirlaba yang perlu menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK No. 45.
4. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta telah menerapkan PSAK No. 45 dalam pembuatan laporan keuangan namun belum pernah dilakukan evaluasi mengenai kesesuaian penyajian laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta dengan PSAK No. 45.

C. Pembatasan Masalah

Luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada dan supaya pembahasan masalah lebih terfokus serta spesifik maka dibutuhkan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah yang akan dibahas, yaitu membatasi pada pembahasan tentang pencatatan dan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia, dalam hal ini Standar Akuntansi Keuangan yang sesuai

adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba serta ketentuan yang berlaku bagi Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 sebagai variabel pembanding dan laporan keuangan yang dianalisis adalah laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2014 saja.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan PSAK No. 45 pada penyajian laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 pada penyajian laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana penerapan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 pada penyajian laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta?
4. Apakah penyajian laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No. 45?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini pembahasannya diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada, yaitu :

1. Menganalisis penerapan PSAK No. 45 pada penyajian laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta.
2. Menganalisis penerapan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 pada penyajian laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta.
3. Menganalisis penerapan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 pada penyajian laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta.
4. Mengevaluasi kesesuaian penyajian laporan keuangan di RSUD Kota Yogyakarta dengan PSAK No. 45.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta berstatus Badan Layanan Umum
 - a. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan PSAK No. 45.

- b. Sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yaitu berorientasi pada hasil, profesionalitas serta akuntabilitas dan transparan.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan-peraturan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Badan Layanan Umum.

3. Bagi Pembaca

- a. Sebagai sumber informasi mengenai penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
- b. Menambah pengetahuan mengenai akuntansi untuk organisasi nirlaba, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

4. Bagi Penulis

Melakukan *Link and Match* antara teori yang diperoleh dengan praktik akuntansi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan merupakan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Standar akuntansi keuangan memuat konsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan tertentu. Standar ini dapat diterapkan sepanjang masih relevan dengan keadaan perusahaan yang bersangkutan.

Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu IAI. Indonesia juga telah memiliki Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Jika terdapat pertentangan antara kerangka dasar dan Standar Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini. Karena kerangka dasar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan di masa datang dan dalam peninjauan kembali

terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka banyaknya kasus konflik tersebut akan berkurang dengan berjalannya waktu (IAI, 2009).

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu:

a. Pengakuan unsur laporan keuangan

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut dengan kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur diakui jika :

- 1) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan.
- 2) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b. Definisi elemen dan pos laporan keuangan

c. Pengukuran unsur laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui setiap laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan laba rugi. Proses ini menyangkut dasar pemilihan tertentu.

d. Pengungkapan atau penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan

Menurut Belkaoui (2000) Standar Akuntansi Keuangan diterbitkan karena:

- a. Melengkapi pemakaian informasi akuntansi dengan informasi tentang posisi keuangan, prestasi dan pelaksanaan dari suatu perusahaan. Informasi ini dianggap jelas, konsisten, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan.
- b. Melengkapi para akuntan publik dengan pedoman dan aturan-aturan tindakan agar memungkinkan mereka menjalankan ketelitian kebebasan dalam menjual keahliannya dan integritas laporan-laporan kantor akuntan dalam membuktikan keabsahan laporan ini.
- c. Menyediakan pemerintah sebagai sumber data untuk berbagai variabel dianggap esensial untuk menjalankan perpajakan, pengaturan perusahaan perencanaan dan pengaturan ekonomi, peningkatan efisiensi ekonomi, dan sasaran lainnya.
- d. Membangkit minat terhadap prinsip-prinsip dan teori-teori di antara seluruh jajaran yang berkepentingan dalam disiplin akuntansi ataupun sekedar menyebarluaskan suatu standar akan membangkitkan banyak kontroversi dan debat dalam praktik dan akademi di mana hal itu lebih baik dari bersikap apatis.

2. Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba sangat

berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan.

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, contohnya penerimaan sumbangan. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mencukupi modalnya dari hutang dan mendanai kegiatan operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran jumlah, saat dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Berikut ini adalah pengertian-pengertian menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 :

a. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi

nirlaba. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai (IAI, 2009) :

- 1) Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.
- 2) Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

- 1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi.
- 2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.
- 3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya.
- 4) Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
- 5) Usaha jasa suatu organisasi.

b. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Nirlaba

Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 meliputi:

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih, serta mengetahui

hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dalam pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki aktivitas serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen.

a) Klasifikasi Aktiva Bersih

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Pengertian istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

- (1) Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan semuanya atau sebagian atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
- (2) Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan, agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

- (3) Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
- (4) Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

Aktiva bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan jasa, penjualan barang, sumbangan dan deviden atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan Aktiva bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasional, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akta pendirian dan dari perjanjian kontrak dengan organisasi lain. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

2) Laporan aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat dalam suatu periode.

a) Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:

- (1) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih,
- (2) Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan

(3) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

b) Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, tidak permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasannya. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sebatas disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.

Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain atau kewajiban sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam kelompok aktiva bersih tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas.

c) Informasi Pemberian Jasa

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi

fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi fungsional bermanfaat untuk membantu para penyumbang, kreditur dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Di samping penyajian klasifikasi penyajian beban secara fungsional, organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada penerima manfaat, pelanggan atau anggota dalam rangka mencapai tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama.

Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa. Umumnya aktivitas pendukung meliputi manajemen dan umum, pencarian dana, dan pengembangan anggota. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya, dan semua aktivitas manajemen dan administrasi, kecuali program pemberian jasa atau pencarian dana, pengadaan daftar alamat penyumbang, pelaksanaan acara khusus pencarian dana, pembuatan penyebaran manual, petunjuk dan bahan lainnya, dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan, pemerintah, dan lain-lain.

Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggota baru, pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis.

3) Laporan arus kas untuk satu periode laporan

Tujuan umum laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan arus tersebut. Penilaian atas kemampuan menghasilkan kas dikaitkan dengan aktivitas yang dijalankan perusahaan, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

a) Aktivitas operasi.

Mencakup penjualan dan pembelian atau produksi barang dan jasa, termasuk penagihan pelanggan, pembayaran kepada pemasok atau karyawan dan pembayaran item-item seperti sewa, pajak, dan bunga.

b) Aktivitas investasi.

Mencakup perolehan dan penjualan aktiva jangka panjang untuk berbagai investasi jangka panjang.

c) Aktivitas pendanaan.

d) Mencakup pengadaan sumber daya dari pemilik serta kreditur dan pengembalian jumlah yang dipinjam.

4) Catatan atas laporan keuangan

Tujuan utama catatan atas laporan keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di laporan posisi

keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan entitas nirlaba. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan mencakup antara lain:

- a) Pendahuluan
- b) Kebijakan akuntansi
- c) Penjelasan atas pos-pos neraca
- d) Penjelasan atas pos-pos laporan aktivitas
- e) Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas
- f) Kewajiban kontinjensi
- g) Informasi tambahan serta pengungkapan lainnya

c. Basis Akuntansi

1) Akuntansi berdasarkan kas (*cash basis*)

Pendapatan dicatat hanya bila kas diterima dan beban dicatat hanya bila kas keluar

2) Akuntansi berdasar akrual (*accrual basis*)

Mengakui dampak transaksi terhadap laporan keuangan dalam periode waktu ketika pendapatan dan beban terjadi. Oleh karena itu pendapatan dicatat pada waktu diterima dan beban dicatat pada waktu terjadi, tidak perlu ketika kas berpindah tangan

3) Akuntansi berdasarkan kas yang dimodifikasi

Merupakan campuran atas dasar kas dan akrual, yaitu metode yang digunakan oleh perusahaan jasa. Pengeluaran yang mempunyai umur

ekonomis lebih dari satu tahun dikapitalisasi sebagai harta dan disusutkan selama tahun-tahun mendatang. Beban dibayar di muka dan ditangguhkan, dan dikurangi hanya dalam tahun saat hal itu digunakan, sedangkan beban yang dibayar sesudah tahun terjadinya (beban yang masih harus dibayar) dikurangi hanya dalam tahun dibayarkan.

Pengukuran Pendapatan

Pendapatan harus memenuhi 2 kriteria untuk dapat dicatat dalam laporan keuangan periode tertentu, yakni:

a) Dihasilkan

Untuk pendapatan yang akan dihasilkan, barang dan jasa harus secara penuh diserahkan. Bukti hal itu biasanya berupa pengiriman kepada pelanggan.

b) Direalisasikan

Pendapatan direalisasikan ketika kas atau klaim diterima dalam pertukaran dengan barang dan jasa.

Penandingan dan Konversi Biaya

Beban diakui dan dicatat dalam laporan keuangan periode yang bersangkutan dimana manfaat ekonominya dikonsumsi atau digunakan. Beban setiap periode dapat dibagi menjadi 2 jenis:

a) Yang dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh dalam periode yang sama dengan pengeluaran.

b) Yang dikaitkan dengan periode waktu itu sendiri.

3. Pengertian Badan Layanan Umum

Sesuai dengan pasal 1 butir 23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan:

“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”.

Secara spesifik karakteristik organisasi yang merupakan Badan Layanan Umum, yaitu:

- a. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan Negara.
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
- c. Tidak mengutamakan pencarian laba.
- d. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi.
- e. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk.
- f. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung.
- g. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
- h. BLU bukan subjek pajak.

Sehubungan dengan karakteristik yang spesifik tersebut. BLU dihadapkan pada peraturan yang spesifik pula, berbeda dengan organisasi yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN/ BUMD). Perbedaan tersebut terletak pada hal-hal sebagai berikut:

- a. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/ daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan.
- c. Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
- d. Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
- e. Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- f. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah.

- g. Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/ daerah.
- h. Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang bersangkutan.
- i. BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
- j. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2005.

Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan bukan bentuknya saja suatu unit pemerintah menjadi Badan Layanan Umum yang melayani masyarakat tetapi tingkat pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara yang profesional, efektif dan efisien oleh pengelola unit tersebut dengan otonomi pengelolaan yang akan diberikan.

Apabila dikelompokkan menurut jenisnya Badan Layanan Umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain.
- b. BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet).
- c. BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM), penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

4. Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum

Dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan Layanan Umum yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Berdasar pertimbangan hal inilah Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

5. Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi organisasi Badan Layanan Umum berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik untuk memberikan layanan yang bermutu dan berkesinambungan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Badan Layanan Umum yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 4400);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

Dengan disahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka status rumah sakit pemerintah kini berubah menjadi Badan Layanan Umum.

6. Rumah Sakit Pemerintah Berstatus Badan Layanan Umum

Istilah Badan Layanan Umum muncul setelah ditetapkannya Undang-Undang no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang ditetapkan sesuai dengan semangat reformasi dan otonomi daerah. Misi reformasi keuangan ditujukan pada akuntabilitas dan transparansi keuangan yang professional. Dengan penetapan rumah sakit pemerintah menjadi Badan Layanan Umum diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Sebagai tahap awal, pemerintah menetapkan 12 rumah sakit yang statusnya perusahaan jawatan (Perjan) menjadi BLU. Yaitu enam rumah sakit di Jakarta (RSCM, RS Persahabatan, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Kanker Dharmais), dan masing-masing satu rumah sakit di Bandung (RS Dr Hasan Sadikin), di Semarang (RS Dr Kariadi), di Denpasar (RS Sanglah), di Makassar (RS Dr Wahidin Sudirohusodo) di Padang (RS Dr M Djamil), dan RS Dr Mohammad Hoesin di Palembang.

Saat ini sebagian besar rumah sakit pemerintah pengelolaannya sudah dalam bentuk BLU.

Tahap selanjutnya, pada tanggal 12 September 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta No.423/Kep/2007 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta juga ditetapkan menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Claudia W. M. Korompis (2013) yang berjudul “Penerapan PSAK No 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Sanggar Seni Budaya Logos Ma’kantar”.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan laporan keuangan Sanggar Seni Budaya Logos Ma’kantar apakah telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 45.

Tempat penelitian ini dilakukan di Sanggar Seni Budaya Logos Ma’kantar. Penelitian dilakukan dengan membandingkan PSAK No 45 dengan penyajian laporan keuangan Sanggar Seni Budaya Logos Ma’kantar. Hasil dari penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan Sanggar Seni Budaya Logos Ma’kantar belum menerapkan sepenuhnya laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan organisasi nirlaba yang ada dalam PSAK No 45 karena belum ada penyajian laporan aktivitas.

Persamaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif. Selain itu cara evaluasi dalam penelitian ini juga memberi gambaran pada peneliti untuk melakukan penelitian dengan cara yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada objek yang dijadikan penelitian. Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah Rumah Sakit, karena itu variabel pembandingnya bertambah. Selain membandingkan laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dengan PSAK No 45 juga membandingkan laporan keuangan tersebut dengan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ronny Hendrawan (2011) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum Studi Kasus di RSUD Kota Semarang”.

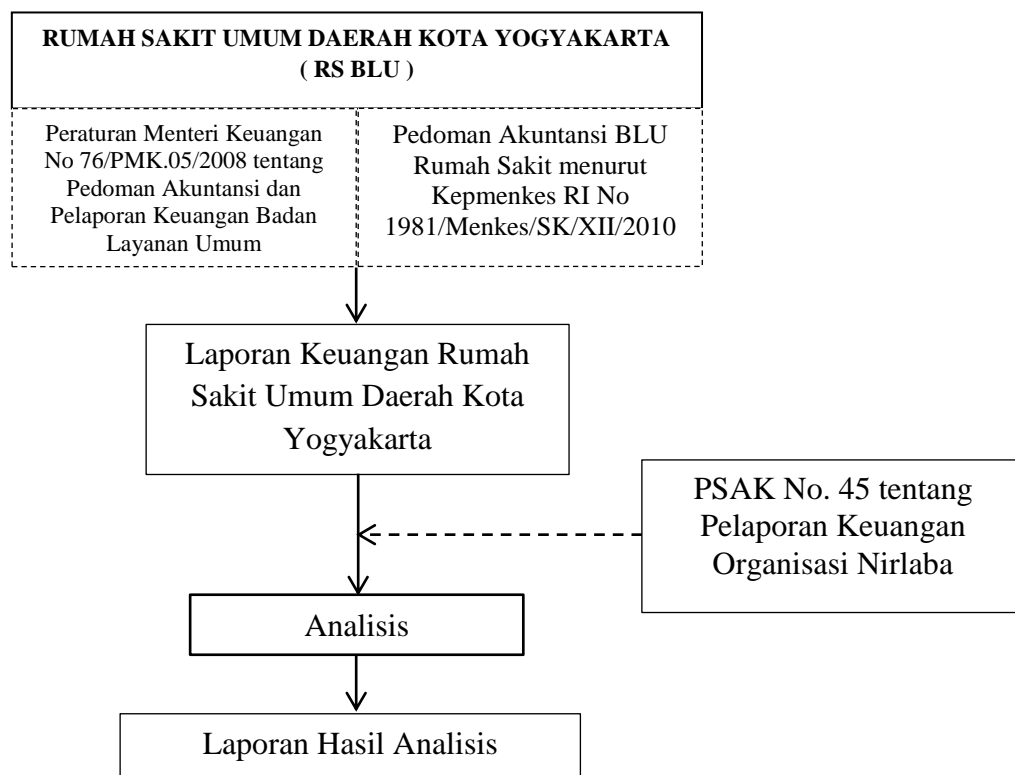
Penelitian ini menyimpulkan bahwa PSAK No 45 tentang Organisasi Nirlaba dapat diterapkan secara penuh sebagai pedoman penyusunan pelaporan keuangan pada Badan Layanan Umum seperti Rumah Sakit Daerah. Penerapan standar akuntansi keuangan ini dapat menciptakan laporan tahunan Badan Layanan Umum yang *reliable* dan *relevant*.

Persamaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif. Selain itu cara evaluasi dalam

penelitian ini juga memberi gambaran pada peneliti untuk melakukan penelitian dengan cara yang hampir sama. Bentuk objek yang diteliti juga sama, yaitu Rumah Sakit Daerah namun lokasinya berbeda.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menganalisis penyajian laporan keuangan yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dengan mengacu pada ketentuan PSAK No 45 dan ketentuan mengenai Badan Layanan Umum seperti Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah komponen pelaporan yang digunakan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45?
2. Apakah klasifikasi aktiva dan kewajiban RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45?
3. Apakah klasifikasi aktiva bersih RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45?
4. Apakah perubahan kelompok aktiva bersih RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45?
5. Apakah perlakuan terhadap pendapatan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45?
6. Apakah perlakuan terhadap beban RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45?
7. Apakah perlakuan terhadap keuntungan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45?
8. Apakah perlakuan terhadap kerugian RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45?
9. Apakah pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45?
10. Apakah pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45?

11. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45?
12. Apakah komponen pelaporan yang digunakan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008?
13. Apakah klasifikasi aktiva dan kewajiban RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008?
14. Apakah klasifikasi aktiva bersih RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008?
15. Apakah perubahan kelompok aktiva bersih RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008?
16. Apakah perlakuan terhadap pendapatan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008?
17. Apakah perlakuan terhadap beban RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008?
18. Apakah perlakuan terhadap keuntungan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008?
19. Apakah perlakuan terhadap kerugian RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008?
20. Apakah pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008?

21. Apakah pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008?
22. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008
23. Apakah komponen pelaporan yang digunakan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010?
24. Apakah klasifikasi aktiva dan kewajiban RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010?
25. Apakah klasifikasi aktiva bersih RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010?
26. Apakah perubahan kelompok aktiva bersih RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010?
27. Apakah perlakuan terhadap pendapatan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010?
28. Apakah perlakuan terhadap beban RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010?
29. Apakah perlakuan terhadap keuntungan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010?
30. Apakah perlakuan terhadap kerugian RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010?

31. Apakah pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010?
32. Apakah pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010?
33. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010?
34. Apakah bentuk dan isi laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta sesuai dengan PSAK No 45?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian kali ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Wirosaban Barat No.1, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Agustus sampai Desember 2016.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Indriarto dan Supomo (1999), pada dasarnya data yang digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu:

a. Data Subjek (*Self Report Data*)

Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, karakteristik dan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Dengan demikian data subjek merupakan data penelitian yang diberikan oleh responden dalam hal ini Bapak Bambang selaku staf bagian keuangan dan akuntansi.

b. Data Dokumenter (Dokumen Data)

Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat, notulen hasil rapat, memo ataupun dalam bentuk laporan program laporan keuangan. Dalam penelitian ini data

dokumenter yang digunakan adalah laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014, dan laporan evaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta tahun 2014.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Berupa data subjek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa data mengenai struktur organisasi, aktivitas operasional yang terjadi, dan gambaran umum organisasi.

b. Data Sekunder

Berupa data internal yang diperoleh dari objek yang diteliti yaitu berupa laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sub bagian keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sedangkan objek penelitian adalah PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 pada penyajian laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari

laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

D. Definisi Operasional Variabel

Implementasi penggunaan PSAK No 45 adalah Penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk organisasi nirlaba. Dalam penelitian ini implementasi penerapan PSAK No 45 hanya difokuskan pada penyajian laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta apakah sesuai atau tidak dengan PSAK No 45.

Penyajian laporan keuangan menurut PSAK No 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba berbeda dengan penyajian laporan keuangan lainnya karena penyajian laporan keuangan menurut PSAK No 45 dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi untuk laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah cara atau alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain laporan keuangan, instrumen lain yang digunakan

untuk mengumpulkan data adalah profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang diperoleh dari web resmi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dan berbagai brosur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan instrumen tambahan berupa hasil wawancara untuk menjadi data pelengkap penelitian yang tidak bisa ditemukan dalam laporan keuangan. Pedoman wawancara telah dibuat dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden. Wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada pihak Sub Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, yaitu Bapak Bambang. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa struktur organisasi, aktivitas operasional yang sering terjadi, gambaran umum, dan kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta pada umumnya.

2. Dokumentasi

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. (Lexy J Moleong,

2014: 217). Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian atau penemuan sebelumnya (*findings*) yang berhubungan dengan proses akuntansi Badan Layanan Umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa sejarah perusahaan, bidang usaha perusahaan, termasuk juga laporan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

G. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti.

Maxfield dalam Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999) mengatakan bahwa penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.

Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang mengevaluasi laporan keuangan tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagai Badan Layanan Umum diawali dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal

kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan mengkombinasikan empat unsur, yaitu:

1. PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.
4. Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta tahun 2014.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi komponen pelaporan yang digunakan
2. Mengidentifikasi klasifikasi aktiva dan kewajiban
3. Mengidentifikasi klasifikasi aktiva bersih
4. Mengidentifikasi perubahan kelompok aktiva bersih
5. Mengidentifikasi perlakuan terhadap pendapatan
6. Mengidentifikasi perlakuan terhadap beban
7. Mengidentifikasi perlakuan terhadap keuntungan
8. Mengidentifikasi perlakuan terhadap kerugian
9. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban
10. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa
11. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas.

H. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktik dalam penyusunan laporan keuangan organisasi. Pada analisis ini dilakukan perbandingan apakah format laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PSAK 45 atau masih perlu dilakukan penyesuaian yang nantinya dideskripsikan sesuai hasil analisis di lapangan.

Apabila penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan sesuai. Apabila penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan tidak sesuai dan sebaiknya perlu dilakukan penyesuaian agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik sehingga memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi penyajian laporan keuangan tersebut guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 30 September 2016 sampai dengan 30 November 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, yaitu data yang didapatkan dari hasil tanya jawab kepada pihak Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dan berupa dokumentasi, yaitu data yang didapatkan dengan mencari informasi yang dibutuhkan melalui dokumen, laporan keuangan, dan hasil wawancara. Penelitian berlangsung selama bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016.

B. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta No.423/Kep/2007 pada tanggal 12 September 2007, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta didirikan di atas tanah seluas lebih dari 27.000 meter persegi dengan luas bangunan lebih dari 15.000 meter persegi yang terletak di Jalan

Wirosaban Barat No 1 Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

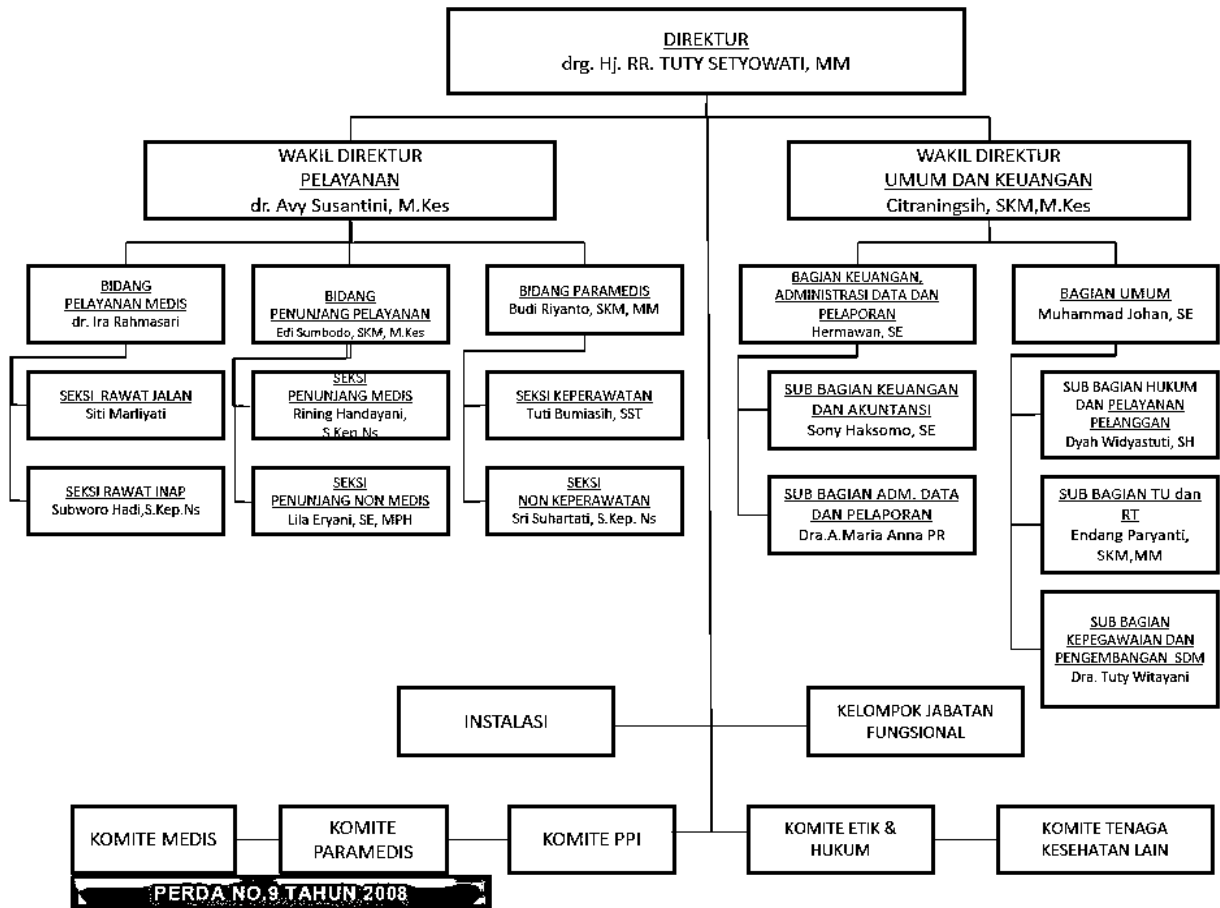
Pelayanan kesehatan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta umumnya berupa Rawat Jalan, Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, serta Klinik Sore. Sedangkan pelayanan kesehatan unggulan berupa Klinik Gigi, Klinik Kulit, Endoscopy, Terapi Wicara, Okupasi Terapi, Klinik Eksekutif dan dengan fasilitas penunjang Radiologi, Laboratorium, Haemodialisa, Fisioterapi, Gizi, dan Instalasi Farmasi. Kapasitas tempat tidur pasien yang dimiliki oleh RSUD Kota Yogyakarta seluruhnya berjumlah 213 (dua ratus tiga belas) bed. Penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah: Pejabat Struktural sebanyak 19 orang, Staf Medis sebanyak 56 orang, Keperawatan dan Bidan sebanyak 260 orang, Kesehatan Lain sebanyak 114 orang, Fungsional Umum sebanyak 197 orang, dan keseluruhan SDM Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebanyak 646 orang.

2. Gambaran Singkat Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta telah terakreditasi sebagai Rumah Sakit Tipe B Pendidikan Berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor HK0203/I/0233/2014 dan telah menerapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan International Standard Organization (ISO) 9001 : 2008 pada pelayanan kesehatan Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, dan proses-proses pendukungnya

meliputi : Laboratorium Patologi, Farmasi, Radiologi, Operasi, Haemodialisa, Instalasi Sterilisasi Central, Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit, Pemulasaraan Jenazah, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Hukum dan Pelayanan Pelanggan, Pengelolaan Teknologi Informasi (IPTI), Kepegawaian, Keuangan, dan Rekam Medis. Akreditasi lain yang telah dicapai yaitu pengakuan jaminan mutu layanan kesehatan atau akreditasi dari Kementerian Kesehatan RI untuk tahun 2007 Standar Penilaian 12 Pelayanan dengan hasil pemberian status akreditasi penuh tingkat lanjut. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sedang berbenah mempersiapkan diri untuk menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional.

3. Struktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta



Gambar 2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
Sumber : Dokumen Profil RSUD Kota Yogyakarta

4. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Visi dari RSUD Kota Yogyakarta adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima dan Menjadi Pilihan Utama Masyarakat”

5. Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

- Mewujudkan pelayanan dengan standar profesi tertinggi berbasis keselamatan pasien, sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan
- Meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai secara berkesinambungan

- c. Mewujudkan Rumah Sakit pendidikan, wahana penelitian, pelatihan dan pengembangan
 - d. Membangun sistem informasi dan Manajemen Rumah Sakit yang handal
 - e. Mewujudkan manajemen yang efektif dan efisien dalam iklim kerja yang terintegrasi dan kondusif
 - f. Ikut mewujudkan Yogyakarta sebagai kota berwawasan lingkungan sehat
6. Tujuan Strategis yang dicanangkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
- a. Terciptanya Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit dambaan masyarakat
 - b. Terciptanya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang aman nyaman, meningkatnya mutu pelayanan medis sesuai standar
 - c. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten
 - d. Tersedianya peralatan medis dan non medis sesuai standar
 - e. Tersedianya Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit yang handal
7. Nilai-nilai Dasar Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
- a. Senyum dalam memberikan pelayanan didasari dengan ketulusan hati
 - b. Empati kepada pasien berusaha memahami dan merasakan keluhan penyakitnya
 - c. Jujur dengan integritas tinggi dalam bekerja dengan penuh tanggungjawab dan rasa syukur
 - d. Upaya sungguh-sungguh sesuai standart dan penuh kesabaran untuk kesembuhan pasien
 - e. Kerja cerdas, trampil, penuh kreativitas dan berbudi luhur.

8. Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Motto dari RSUD Kota Yogyakarta yaitu, “Melayani dengan senyum dan upaya terbaik”.

C. Hasil Analisis

1. Komponen Pelaporan yang Digunakan

Tabel 1. Analisis Komponen Pelaporan yang Digunakan RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45

No	Komponen Pelaporan yang Digunakan	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
1.1	PSAK No 45 : Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.	Laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.	Sesuai	Perbedaan hanya terletak pada penyebutan istilah. PSAK No 45 menggunakan istilah laporan aktivitas, sedangkan laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta menggunakan istilah laporan operasional.

Data dari tabel 1 menunjukkan bahwa komponen pelaporan yang digunakan pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45.

Tabel 2. Analisis Komponen Pelaporan yang Digunakan RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008

No	Komponen Pelaporan yang Digunakan	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
1.2	Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU : Laporan Keuangan terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional 2. Neraca	Laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.	Sesuai	Komponen pelaporan yang digunakan RSUD Kota Yogyakarta sama dengan komponen pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No

No	Komponen Pelaporan yang Digunakan	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
1.2	3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan		Sesuai	76/PMK.05/2008

Data dari tabel 2 menunjukkan bahwa komponen pelaporan yang digunakan pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Tabel 3. Analisis Komponen Pelaporan yang Digunakan RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010

No	Komponen Pelaporan yang Digunakan	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
1.3	Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit : Laporan Keuangan terdiri dari: 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 2. Laporan Aktivitas 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan	Laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.	Sesuai	Perbedaan hanya terletak pada penyebutan istilah. Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 menggunakan istilah laporan aktivitas, sedangkan laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta menggunakan istilah laporan operasional.

Data dari tabel 3 menunjukkan bahwa komponen pelaporan yang digunakan pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit.

2. Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban

Tabel 4. Analisis Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45

No	Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
2.1	PSAK No 45 : Disajikan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki	Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.	Sesuai	Perbedaan hanya terletak pada penyebutan pengklasifikasian

No	Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
2.1	<p>karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas, dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo. 2. Mengelompokkan aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang. 3. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada catatan atas laporan keuangan. 	<p>Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, penyisihan kerugian piutang, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar dimuka.</p> <p>Aset tetap terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.</p> <p>Aset lainnya terdiri dari aset kerjasama operasi, aset sewa guna, aset tak berwujud dan aset lain-lain.</p> <p>Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban lancar (jangka pendek) dan kewajiban jangka panjang, dan dicatat sesuai urutan likuiditasnya.</p>	Sesuai	<p>aktiva / aset. PSAK No 45 mengklasifikasikan aktiva ke dalam aktiva lancar dan tidak lancar, sedangkan laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta mengklasifikasikan aset ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya</p>

Data dari tabel 4 menunjukkan bahwa klasifikasi aktiva dan kewajiban pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45.

Tabel 5. Analisis Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008

No	Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
2.2	<p>Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU :</p> <p>Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar.</p>	<p>Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.</p> <p>Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas,</p>	Sesuai	<p>Pengklasifikasian aktiva dan kewajiban yang dilakukan oleh RSUD Kota Yogyakarta sama dengan</p>

No	Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
2.2	<p>Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar dimuka. Aset non lancar antara lain meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.</p> <p>Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.</p>	<p>investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, penyisihan kerugian piutang, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar dimuka.</p> <p>Aset tetap terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.</p> <p>Aset lainnya terdiri dari aset kerjasama operasi, aset sewa guna, aset tak berwujud dan aset lain-lain.</p> <p>Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban lancar (jangka pendek) dan kewajiban jangka panjang, dan dicatat sesuai urutan likuiditasnya.</p>	Sesuai	pengklasifikasian aktiva dan kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008

Data dari tabel 5 menunjukkan bahwa klasifikasi aktiva dan kewajiban pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Tabel 6. Analisis Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010

No	Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
2.3	<p>Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit :</p> <p>Membagi Aset Menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset lancar 2. Aset tetap 3. Aset lain-lain <p>Membagi Kewajiban</p>	<p>Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.</p> <p>Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang</p>	Sesuai	Pengklasifikasian aktiva dan kewajiban yang dilakukan oleh RSUD Kota Yogyakarta sama dengan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban

No	Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
2.3	Menjadi : 1. Kewajiban Jangka Pendek 2. Kewajiban Jangka Panjang	lain-lain, penyisihan kerugian piutang, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar dimuka. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset kerjasama operasi, aset sewa guna, aset tak berwujud dan aset lain-lain. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban lancar (jangka pendek) dan kewajiban jangka panjang, dan dicatat sesuai urutan likuiditasnya.	Sesuai	berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII /2010

Data dari tabel 6 menunjukkan bahwa klasifikasi aktiva dan kewajiban pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit.

3. Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat

Tabel 7. Analisis Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45

No	Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
3.1	PSAK No 45 : Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu:	Ekuitas diklasifikasikan ke dalam ekuitas tidak terikat, terikat temporer, dan ekuitas terikat permanen. Ekuitas tidak terikat terdiri dari ekuitas awal,	Tidak Sesuai	Seluruh ekuitas dicatat ke dalam ekuitas tidak terikat dengan perhitungan jumlah selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban yang dijelaskan

No	Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
3.1	<p>terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat.</p> <p>Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.</p>	surplus dan defisit tahun lalu, surplus dan defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi.	Tidak Sesuai	dalam catatan atas laporan keuangan.

Data dari tabel 7 menunjukkan bahwa klasifikasi aktiva bersih terikat atau tidak terikat pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta tidak sesuai dengan PSAK No 45.

Tabel 8. Analisis Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008

No	Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
3.2	<p>Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU :</p> <p>Ekuitas adalah hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ekuitas tidak terikat 2. ekuitas terikat temporer 3. ekuitas terikat Permanen 	<p>Ekuitas diklasifikasikan ke dalam ekuitas tidak terikat, terikat temporer, dan ekuitas terikat permanen.</p> <p>Ekuitas tidak terikat terdiri dari ekuitas awal, surplus dan defisit tahun lalu, surplus dan defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi.</p>	Sesuai	<p>Pengklasifikasian aktiva bersih terikat atau tidak terikat yang dilakukan oleh RSUD Kota Yogyakarta sama dengan pengklasifikasian aktiva bersih terikat atau tidak terikat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008</p>

Data dari tabel 8 menunjukkan bahwa klasifikasi aktiva bersih terikat atau tidak terikat pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Tabel 9. Analisis Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010

No	Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
3.3	Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit : Ekuitas Rumah Sakit meliputi : 1. Ekuitas awal 2. Surplus dan defisit tahun lalu 3. Surplus dan defisit tahun berjalan 4. Ekuitas donasi	Ekuitas diklasifikasikan ke dalam ekuitas tidak terikat, terikat temporer, dan ekuitas terikat permanen. Ekuitas tidak terikat terdiri dari ekuitas awal, surplus dan defisit tahun lalu, surplus dan defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi.	Sesuai	Pengklasifikasian aktiva bersih terikat atau tidak terikat yang dilakukan oleh RSUD Kota Yogyakarta sama dengan pengklasifikasian aktiva bersih terikat atau tidak terikat berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010

Data dari tabel 9 menunjukkan bahwa klasifikasi aktiva bersih terikat atau tidak terikat pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit.

4. Perubahan Kelompok Aktiva Bersih

Tabel 10. Analisis Perubahan Kelompok Aktiva Bersih RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45

No	Perubahan Kelompok Aktiva Bersih	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
4.1	PSAK No 45 : Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.	Dalam laporan operasional menyajikan jumlah pendapatan operasional, biaya operasional, pendapatan non operasional, dan biaya non operasional dalam suatu periode yang mempengaruhi perubahan jumlah ekuitas	Tidak Sesuai	Di dalam laporan operasional tidak ada klasifikasi jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.

Data dari tabel 10 menunjukkan bahwa perubahan kelompok aktiva bersih pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta tidak sesuai dengan PSAK No 45.

Tabel 11. Analisis Perubahan Kelompok Aktiva Bersih RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008

No	Perubahan Kelompok Aktiva Bersih	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
4.2	Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU : Dalam laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dalam suatu periode.	Dalam laporan operasional menyajikan jumlah pendapatan operasional, biaya operasional, pendapatan non operasional, dan biaya non operasional dalam suatu periode yang mempengaruhi perubahan jumlah ekuitas	Sesuai	Perubahan kelompok aktiva bersih yang dilakukan oleh RSUD Kota Yogyakarta sama dengan perubahan kelompok aktiva bersih berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008

Data dari tabel 11 menunjukkan bahwa perubahan kelompok aktiva bersih pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Tabel 12. Analisis Perubahan Kelompok Aktiva Bersih RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010

No	Perubahan Kelompok Aktiva Bersih	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
4.3	Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit : Laporan aktivitas menyajikan pendapatan dan keuntungan yang menambah ekuitas serta beban dan kerugian yang mengurangi ekuitas.	Dalam laporan operasional menyajikan jumlah pendapatan operasional, biaya operasional, pendapatan non operasional, dan biaya non operasional dalam suatu periode yang mempengaruhi perubahan jumlah ekuitas	Sesuai	Perubahan kelompok aktiva bersih yang dilakukan oleh RSUD Kota Yogyakarta sama dengan perubahan kelompok aktiva bersih berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010

Data dari tabel 12 menunjukkan bahwa perubahan kelompok aktiva bersih pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit.

5. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian

Tabel 13. Analisis Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45

No	Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
5.1	<p>PSAK No 45 :</p> <p>Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat.</p> <p>Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.</p> <p>Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.</p>	<p>Laporan operasional menyajikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan sebagai penambah ekuitas bersih yang terdiri dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah Hibah terikat disajikan sebagai penambah ekuitas yang dicatat sesuai tujuan pembiayaannya. Jika bertujuan untuk pembiayaan operasional tertentu, maka dicatat sampai dengan pembiayaan operasional tertentu tersebut dilaksanakan. Sedangkan jika bertujuan untuk perolehan aset tetap maka dicatat pada neraca dana hibah terikat. Informasi mengenai hibah tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 2. Biaya sebagai pengurang ekuitas bersih terdiri dari 	Sesuai	<p>Perbedaan hanya terletak pada penyebutan istilah. PSAK No 45 menggunakan istilah beban, sedangkan laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta menggunakan istilah biaya.</p> <p>PSAK No 45 menggunakan istilah sumbangan, sedangkan laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta menggunakan istilah hibah.</p>

No	Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
5.1		biaya pelayanan, dan biaya umum dan administrasi 3. Pendapatan non operasional dan beban non operasional 4. Surplus/Defisit tahun berjalan bersih dari hasil pengurangan atau selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah biaya.	Sesuai	-

Data dari tabel 13 menunjukkan bahwa klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45.

Tabel 14. Analisis Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008

No	Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
5.2	<p>Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU :</p> <p>Laporan operasional menyajikan jumlah pendapatan, biaya, keuntungan/ kerugian, pos luar biasa dalam suatu periode.</p> <p>Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.</p> <p>Pendapatan diklasifikasikan ke dalam:</p> <p>1. Pendapatan Usaha</p>	<p>Laporan operasional menyajikan :</p> <p>1. Pendapatan sebagai penambah ekuitas bersih yang terdiri dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah</p> <p>Hibah terikat disajikan sebagai penambah ekuitas yang dicatat sesuai tujuan pembiayaannya. Jika bertujuan untuk pembiayaan operasional tertentu, maka dicatat sampai</p>	Sesuai	<p>Pengklasifikasian pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang dilakukan oleh RSUD Kota Yogyakarta sama dengan pengklasifikasian pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008</p>

No	Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
5.2	<p>dari Jasa Layanan</p> <p>2. Hibah</p> <p>3. Pendapatan APBN</p> <p>4. Pendapatan Usaha Lainnya</p> <p>5. Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa</p> <p>Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.</p> <p>Biaya BLU diklasifikasikan:</p> <p>1. Biaya Layanan</p> <p>2. Biaya Umum dan Administrasi</p> <p>3. Biaya Lainnya</p> <p>4. Rugi Penjualan Aset Non Lancar</p> <p>5. Biaya dari Kejadian Luar Biasa</p>	<p>dengan pembiayaan operasional tertentu tersebut dilaksanakan.</p> <p>Sedangkan jika bertujuan untuk perolehan aset tetap maka dicatat pada neraca dana hibah terikat. Informasi mengenai hibah tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.</p> <p>6. Biaya sebagai penguran ekuitas bersih terdiri dari biaya pelayanan, dan biaya umum dan administrasi</p> <p>7. Pendapatan non operasional dan beban non operasional</p> <p>8. Surplus/Defisit tahun berjalan bersih dari hasil pengurangan atau selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah biaya.</p>	Sesuai	

Data dari tabel 14 menunjukkan bahwa klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Tabel 15. Analisis Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010

No	Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
5.3	<p>Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit :</p> <p>Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah ekuitas kecuali jika penggunaannya dibatasi</p>	<p>Laporan operasional menyajikan :</p> <p>1. Pendapatan sebagai penambah ekuitas bersih yang terdiri dari jasa layanan, hibah, hasil</p>	Sesuai	Perbedaan hanya terletak pada penyebutan istilah. Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 menggunakan istilah beban,

No	Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
5.3	<p>oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang ekuitas.</p> <p>Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan kewajiban sebagai penambah atau pengurang ekuitas, kecuali jika penggunaannya dibatasi.</p>	<p>kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah</p> <p>Hibah terikat disajikan sebagai penambah ekuitas yang dicatat sesuai tujuan pembiayaannya. Jika bertujuan untuk pembiayaan operasional tertentu, maka dicatat sampai dengan pembiayaan operasional tertentu tersebut dilaksanakan. Sedangkan jika bertujuan untuk perolehan aset tetap maka dicatat pada neraca dana hibah terikat. Informasi mengenai hibah tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.</p> <p>2. Biaya sebagai pengurang ekuitas bersih terdiri dari biaya pelayanan, dan biaya umum dan administrasi</p> <p>3. Pendapatan non operasional dan beban non operasional</p> <p>4. Surplus/Defisit tahun berjalan bersih dari hasil pengurangan atau selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah biaya.</p>	Sesuai	sedangkan laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta menggunakan istilah biaya.

Data dari tabel 15 menunjukkan bahwa klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit.

6. Informasi Pendapatan dan Beban

Tabel 16. Analisis Informasi Pendapatan dan Beban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45

No	Informasi Pendapatan dan Beban	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
6.1	PSAK No 45 : Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.	Dalam laporan operasional disajikan jumlah pendapatan secara bruto yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih, dan biaya yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.	Sesuai	Perbedaan hanya terletak pada penyebutan istilah. PSAK No 45 menggunakan istilah beban, sedangkan laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta menggunakan istilah biaya.

Data dari tabel 16 menunjukkan bahwa informasi pendapatan dan beban pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45.

Tabel 17. Analisis Informasi Pendapatan dan Beban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008

No	Informasi Pendapatan dan Beban	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
6.2	Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU : Laporan operasional menyajikan jumlah pendapatan secara bruto yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih, dan biaya yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.	Dalam laporan operasional disajikan jumlah pendapatan secara bruto yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih, dan biaya yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.	Sesuai	Pencatatan informasi pendapatan dan beban yang dilakukan oleh RSUD Kota Yogyakarta sama dengan pencatatan informasi pendapatan dan beban berdasarkan Peraturan Menteri

No	Informasi Pendapatan dan Beban	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
6.2			Sesuai	Keuangan No 76/PMK.05/2008

Data dari tabel 17 menunjukkan bahwa informasi pendapatan dan beban pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Tabel 18. Analisis Informasi Pendapatan dan Beban RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010

No	Informasi Pendapatan dan Beban	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
6.3	Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit : Laporan aktivitas menyajikan pendapatan secara bruto dan beban dalam bentuk arus kas keluar yang mengakibatkan penurunan ekuitas	Dalam laporan operasional disajikan jumlah pendapatan secara bruto yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih, dan biaya yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.	Sesuai	Perbedaan hanya terletak pada penyebutan istilah. Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 menggunakan istilah beban, sedangkan laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta menggunakan istilah biaya.

Data dari tabel 18 menunjukkan bahwa informasi pendapatan dan beban pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit.

7. Informasi Pemberian Jasa

Tabel 19. Analisis Informasi Pemberian Jasa RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45

No	Informasi Pemberian Jasa	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
7.1	PSAK No 45 : Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut	Laporan operasional menyajikan informasi biaya menurut penggunaannya, yakni biaya operasional dan biaya non operasional,	Sesuai	Perbedaan hanya terletak pada penyebutan istilah dan pengklasifikasiannya. PSAK No. 45

No	Informasi Pemberian Jasa	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
7.1	klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.	Biaya operasional terdiri dari biaya pelayanan, dan biaya umum dan administrasi.	Sesuai	menggunakan istilah beban dan diklasifikasikan menurut fungsionalnya, sedangkan laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta menggunakan istilah biaya dan diklasifikasikan menurut penggunaannya

Data dari tabel 19 menunjukkan bahwa informasi pemberian jasa pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45.

Tabel 20. Analisis Informasi Pemberian Jasa RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008

No	Informasi Pemberian Jasa	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
7.2	Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU : Laporan operasional menyajikan informasi biaya yang terdiri dari: 1. Biaya Layanan 2. Biaya Umum dan Administrasi 3. Biaya Lainnya 4. Rugi Penjualan Aset Non Lancar 5. Biaya dari Kejadian Luar Biasa	Laporan operasional menyajikan informasi biaya menurut penggunaannya, yakni biaya operasional dan biaya non operasional, Biaya operasional terdiri dari biaya pelayanan, dan biaya umum dan administrasi.	Sesuai	Pecatatan mengenai informasi pemberian jasa yang dilakukan RSUD Kota Yogyakarta sama dengan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008

Data dari tabel 20 menunjukkan bahwa informasi pemberian jasa pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Tabel 21. Analisis Informasi Pemberian Jasa RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010

No	Informasi Pemberian Jasa	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
7.3	Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit : Beban yang berasal dari kegiatan rumah sakit dapat berasal dari: 1. Beban layanan 2. Beban umum dan administrasi 3. Rugi penjualan aset non lancar 4. Kerugian penurunan nilai 5. Rugi & beban lain	Laporan operasional menyajikan informasi biaya menurut penggunaannya, yakni biaya operasional dan biaya non operasional, Biaya operasional terdiri dari biaya pelayanan, dan biaya umum dan administrasi.	Sesuai	Perbedaan hanya terletak pada penyebutan istilah. Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 menggunakan istilah beban, sedangkan laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta menggunakan istilah biaya.

Data dari tabel 21 menunjukkan bahwa informasi pemberian jasa pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit.

8. Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Tabel 22. Analisis Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan PSAK No 45

No	Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
8.1	PSAK No 45 : Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK No. 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini: 1. Aktivitas pendanaan: a. penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang b. penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk	Berdasarkan kegiatan operasional RSUD Kota Yogyakarta, laporan arus kas menyajikan: 1. Arus kas dari aktivitas operasi meliputi : a. Arus kas masuk terdiri dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, pendapatan, APBD, pendapatan APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah	Sesuai	Pada PSAK No. 45 terdapat pos rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk menambah aktivitas operasi yang tidak diperlukan dalam laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta

No	Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
8.1	<p>perolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment).</p> <p>b. bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.</p> <p>Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.</p>	<p>b. Arus kas keluar terdiri dari biaya operasional yang meliputi biaya layanan, dan biaya umum dan administrasi; dan biaya non operasional</p> <p>2. Arus kas dari aktivitas investasi meliputi :</p> <p>a. Arus kas masuk terdiri dari hasil penjualan aset tetap, hasil penjualan investasi jangka panjang, dan hasil penjualan aset lainnya.</p> <p>b. Arus kas keluar terdiri dari perolehan aset tetap, perolehan investasi jangka panjang, dan perolehan aset lainnya.</p> <p>3. Arus kas dari aktivitas pendanaan meliputi :</p> <p>a. Arus kas masuk terdiri dari perolehan pinjaman, dan penerimaan kembali pokok pinjaman.</p> <p>b. Arus kas keluar terdiri dari pembayaran pokok pinjaman, dan pemberian pinjaman.</p>	Sesuai	

Data dari tabel 22 menunjukkan bahwa klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK No 45.

Tabel 23. Analisis Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008

No	Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
8.2	Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU : Laporan arus kas menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.	Berdasarkan kegiatan operasional RSUD Kota Yogyakarta, laporan arus kas menyajikan: 1. Arus kas dari aktivitas operasi meliputi : a. Arus kas masuk terdiri dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, pendapatan APBD, pendapatan APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. b. Arus kas keluar terdiri dari biaya operasional yang meliputi biaya layanan, dan biaya umum dan administrasi; dan biaya non operasional 2. Arus kas dari aktivitas investasi meliputi : a. Arus kas masuk terdiri dari hasil penjualan aset tetap, hasil penjualan investasi jangka panjang, dan hasil penjualan aset lainnya. b. Arus kas keluar terdiri dari perolehan aset tetap, perolehan	Sesuai	Pengklasifikasian penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan RSUD Kota Yogyakarta sama dengan pengklasifikasian yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008

No	Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
8.2		<p>investasi jangka panjang, dan perolehan aset lainnya.</p> <p>3. Arus kas dari aktivitas pendanaan meliputi :</p> <p>a. Arus kas masuk terdiri dari perolehan pinjaman, dan penerimaan kembali pokok pinjaman.</p> <p>b. Arus kas keluar terdiri dari pembayaran pokok pinjaman, dan pemberian pinjaman.</p>	Sesuai	

Data dari tabel 23 menunjukkan bahwa klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Tabel 24. Analisis Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas RSUD Kota Yogyakarta berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010

No	Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
8.3	<p>Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit :</p> <p>Laporan arus kas terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arus kas dari aktivitas operasi 2. Arus kas dari aktivitas Investasi 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan 4. Kenaikan bersih kas 5. Kas dan setara kas awal 6. Jumlah saldo kas dan bank 	<p>Berdasarkan kegiatan operasional RSUD Kota Yogyakarta, laporan arus kas menyajikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arus kas dari aktivitas operasi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Arus kas masuk terdiri dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, pendapatan APBD, pendapatan APBN, dan lain-lain pendapatan 	Sesuai	Pengklasifikasian penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan RSUD Kota Yogyakarta sama dengan pengklasifikasian yang dilakukan berdasarkan Kepmenkes RI No. 1981/Menkes/SK/XII/2010

No	Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
8.3		<p>BLUD yang sah.</p> <p>b. Arus kas keluar terdiri dari biaya operasional yang meliputi biaya layanan, dan biaya umum dan administrasi; dan biaya non operasional</p> <p>2. Arus kas dari aktivitas investasi meliputi :</p> <p>a. Arus kas masuk terdiri dari hasil penjualan aset tetap, hasil penjualan investasi jangka panjang, dan hasil penjualan aset lainnya.</p> <p>b. Arus kas keluar terdiri dari perolehan aset tetap, perolehan investasi jangka panjang, dan perolehan aset lainnya.</p> <p>3. Arus kas dari aktivitas pendanaan meliputi :</p> <p>a. Arus kas masuk terdiri dari perolehan pinjaman, dan penerimaan kembali pokok pinjaman.</p> <p>b. Arus kas keluar terdiri dari pembayaran pokok pinjaman, dan pemberian pinjaman.</p>	Sesuai	

Data dari tabel 24 menunjukkan bahwa klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta telah sesuai Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit.

D. Pembahasan

1. Komponen Pelaporan yang Digunakan

Hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator pertama yaitu komponen pelaporan yang digunakan terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 45 yang berisi laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan (neraca), laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 yang berisi laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran dan/atau laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 yang berisi laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Secara umum komponen pelaporan yang digunakan telah sesuai, namun ada beberapa perbedaan pada penyebutan nama, contohnya pada laporan keuangan RSUD

Kota Yogyakarta digunakan istilah laporan operasional sedangkan pada PSAK No. 45 digunakan istilah laporan aktivitas. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya memiliki makna yang sama, yaitu menyajikan informasi tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU.

2. Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator kedua yaitu Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Secara umum bentuk klasifikasi aktiva dan kewajiban telah sesuai, namun ada beberapa perbedaan pada penyebutan nama dan klasifikasinya, sebagai contoh pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta aset diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya; sedangkan pada PSAK No. 45 aktiva diklasifikasikan ke dalam aktiva lancar dan tidak lancar.

3. Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat

Menurut hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta dapat dilihat bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator ketiga yaitu Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut

Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010; namun tidak sesuai dengan PSAK No. 45. Ketidaksesuaian antara laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta dengan PSAK No. 45 dikarenakan adanya perbedaan dalam pencatatan dan pengklasifikasian. Pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta dicatat dan diklasifikasikan ke dalam ekuitas tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen (walaupun diklasifikasikan namun seluruh ekuitas dicatat dan dikelompokkan ke dalam ekuitas tidak terikat); sedangkan pada PSAK No. 45 dicatat dan diklasifikasikan ke dalam aktiva terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Adapun hakekat dari ekuitas menurut Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 (halaman 61 bagian penjelasan) dan aktiva bersih tidak terikat menurut PSAK No. 45 (paragraf 18) adalah sama, yaitu tertulis “pada umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan deviden atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut”.

4. Perubahan Kelompok Aktiva Bersih

Hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator keempat yaitu Perubahan Kelompok Aktiva Bersih telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit

menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010; namun tidak sesuai dengan PSAK No. 45. Ketidaksesuaian antara laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta dengan PSAK No. 45 disebabkan karena tidak adanya klasifikasi jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam satu periode pada laporan operasional laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta. Disisi lain antara laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit secara umum sama, hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama dan klasifikasinya, yaitu pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta digunakan istilah biaya sedangkan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menggunakan istilah beban.

5. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta diketahui bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator kelima yaitu Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Secara umum klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian telah sesuai, hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama dan klasifikasinya, sebagai contoh, yaitu pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta digunakan istilah biaya sedangkan pada

PSAK No. 45 dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit digunakan istilah beban.

6. Informasi Pendapatan dan Beban

Menurut hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta dapat dilihat bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator keenam yaitu Informasi Pendapatan dan Beban telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Secara umum informasi pendapatan dan beban telah sesuai, hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama, contohnya pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta digunakan istilah biaya sedangkan pada PSAK No. 45 dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menggunakan istilah beban.

7. Informasi Pemberian Jasa

Hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator ketujuh yaitu Informasi Pemberian Jasa telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Secara umum informasi pemberian jasa telah sesuai, hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama dan klasifikasinya, yaitu pada laporan keuangan RSUD

Kota Yogyakarta digunakan istilah biaya sedangkan pada PSAK No. 45 dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit digunakan istilah beban. Selain itu pada PSAK No. 45 terdapat pengklasifikasian beban menurut klasifikasi fungsionalnya seperti kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung; sedangkan pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta biaya diklasifikasikan menurut penggunaan seperti biaya operasional dan non operasional.

8. Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Berdasarkan Hasil penelitian di RSUD Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta pada indikator kedelapan yaitu Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Secara umum klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas telah sesuai, namun pada PSAK No. 45 terdapat rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk menambah aktivitas operasi, sedangkan pada laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta tidak diperlukan.

E. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh hanya berdasarkan laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2014 dan

wawancara tanpa mengikuti praktik secara langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan mengingat minimnya waktu dan kesibukan karyawan RSUD Kota Yogyakarta khususnya di Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi. Sehingga untuk penelitian selanjutnya tidak hanya berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat saja, tetapi juga mengikuti praktik secara langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan, agar proses penyusunan pelaporan keuangan dapat dijabarkan lebih rinci.

Keterbatasan yang kedua adalah penelitian ini tidak memperoleh data laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta periode terakhir (Laporan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta tahun 2015) dikarenakan sedang dilakukan proses rekonsiliasi laporan keuangan dengan pemerintah daerah. Hal ini berakibat pada penelitian yang dirasa kurang *up to date* bagi para pembaca.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Ada 2 indikator dalam laporan keuangan RSUD Kota Yogyakarta yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45, yaitu indikator ke tiga tentang klasifikasi aktiva bersih terikat dan tidak terikat serta indikator ke empat tentang perubahan kelompok aktiva bersih.
2. RSUD Kota Yogyakarta telah menyajikan laporan keuangan sesuai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008.
3. RSUD Kota Yogyakarta telah menyajikan laporan keuangan sesuai Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.
4. Secara keseluruhan, RSUD Kota Yogyakarta telah menerapkan PSAK No. 45 ke dalam laporan keuangannya dengan baik.

B. Saran

1. Bagi RSUD Kota Yogyakarta

RSUD Kota Yogyakarta diharapkan dapat terus mengikuti perkembangan peraturan penyajian laporan keuangan khususnya PSAK No.

45 dan ketentuan yang berlaku bagi BLU yaitu Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 yang dapat diperbaharui kapan saja sesuai dengan perkembangan zaman.

Setelah melakukan wawancara dan dokumentasi di RSUD Kota Yogyakarta, sangat terlihat keterbatasan sumber daya manusia khususnya di bagian keuangan dan akuntansi, oleh sebab itu sebaiknya pihak manajemen RSUD Kota Yogyakarta menambah SDM pada bagian keuangan dan akuntansi agar dapat menyusun dan melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu serta meningkatkan kompetensi SDM mengenai penyajian laporan keuangan dan tidak bergantung sepenuhnya pada sistem akuntansi terkomputerisasi.

2. Bagi Pemerintah

Perlunya penyusunan sebuah Standar Akuntansi Balai Besar Kesehatan yang berstatus Badan Layanan Umum dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia dalam rangka memenuhi amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi Organisasi Nirlaba. 2013. *Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba*.
- Horngren, Charles T., Harrison, Walter T. 2007. *Akuntansi*. Jakarta: Erlangga
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2010. *PSAK 45: Akuntansi Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lexy J. Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Empat*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
- Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit
- Pontoh, Chenly Ribka. 2013. *Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No 45 pada Gereja Bzl*. Unsrat Manado: Jurnal Emba
- Rumahsakitjogja.jogjakota.go.id diakses pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 pukul 13.23 WIB
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

LAMPIRAN 1
SURAT PERIJINAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 554902, 586168 pesawat 817, Fax (0274) 554902
Laman: fe.uny.ac.id E-mail: fe@uny.ac.id

Nomor : 1486/UN34.18/LT/2016
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Hal : Permohonan Ijin Pra Survey

3 Agustus 2016

Yth. Kepala Bagian Keuangan
Rumah Sakit Jogja Wirosaban
Jl. Wirosaban No. 1 Yogyakarta
55162

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ida Bagus Made Cahya Restu Aji
NIM : 12812144044
Program Studi : Akuntansi - S1
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus pada Rumah Sakit Jogja Wirosaban)
Tujuan : Memohon ijin melaksanakan *pra survey* penulisan Tugas Akhir Skripsi
Waktu *Pra-Survey* : Kamis - Senin, 4 - 8 Agustus 2016

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wakil Dekan I



Tembusan :
1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Prof. Sukirno, S.Pd., M.Si., Ph.D.
NIP. 196904141994031002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 554902, 586168 pesawat 817, Fax (0274) 554902
Laman: fe.uny.ac.id E-mail: fe@uny.ac.id

Nomor : 1487/UN34.18/LT/2016

4 Agustus 2016

Lamp. : 1 Bendel Proposal

Hal : Permohonan ijin Studi Pendahuluan

Yth . Direktur Utama
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
Jl. Wirosaban No. 1 Yogyakarta
55162

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ida Bagus Made Cahya Restu Aji
NIM : 12812144044
Program Studi : Akuntansi - S1
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta)
Tujuan : Memohon ijin melaksanakan *pra survey* penulisan Tugas Akhir Skripsi
Waktu *Pra-Survey* : Jumat - Jumat, 5 - 12 Agustus 2016

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Prof. Sukirno, S.Pd., M.Si., Ph.D.
NIP. 196904141994031002

Tembusan :

1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Wirosaban No 1 Yogyakarta Kode Pos : 55162 Telp. (0274)371195. Fax.(0274)385769
E-MAIL : rsud@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227880001 HOTLINE E-MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT IJIN PENGAMBILAN DATA

Nomor : 445 / 9025

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur RSUD Kota Yogyakarta :

N a m a : drg. Hj. RR. Tuty Seryowati, MM
N I P : 19620502 198701 2 001

Memberikan ijin kepada :

N a m a : Ida Bagus Made Cahya Restu Aji
N I M : 12812144044
Instansi : Akuntansi Fakultas Ekonomi UNY
Tanggal Pelaksanaan : 19 Agustus – 19 September 2016

Untuk dapat melakukan pengambilan data dengan judul :

"Analisis Penerapan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta)".

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Agustus 2016
DIREKTUR
RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH
drg. Hj. RR. Tuty Seryowati, MM
NIP. 19620502 198701 2 001



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWI MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEPERILAIAN - KEPERILAIAN - KEPERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Wirosaban No 1 Yogyakarta Kode Pos : 55162 Telp. (0274)371195, Fax.(0274)385769
E-MAIL : rsud@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227880001 HOTLINE E-MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

No. 070 / 1225

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur RSUD Kota Yogyakarta, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a . : Ida Bagus Made Cahya Restu Aji
N I M : 12812144044
Institusi : Akuntansi Fakultas Ekonomi UNY

Telah selesai melakukan pengambilan data/study pendahuluan dengan judul / topik :
“Analisis Penerapan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2016

DIREKTUR



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/211/9/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS EKONOMI** Nomor : **1618/UN34.18/LT/2016**
Tanggal : **16 SEPTEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **IDA BAGUS MADE CAHYA RESTU AJI** NIP/NIM : **12812144044**
Alamat : **FAKULTAS EKONOMI, AKUNTANSI, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
Judul : **ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA PADA RUMAH SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT UMUM DARAH KOTA YOGYAKARTA)**
Lokasi : **DINAS KESEHATAN DIY**
Waktu : **16 SEPTEMBER 2016 s/d 16 DESEMBER 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **16 SEPTEMBER 2016**.
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. DINAS KESEHATAN DIY
4. WAKIL DEKAN I FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3321

6558/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/211/9/2016 Tanggal : 26 September 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan, Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : IDA BAGUS MADE CAHYA RESTU AJI
No. Mhs/ NIM : 12812144044
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - UNY
Alamat : Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta
Penanggungjawab : Abdullah Taman, S.E., M.Si., Ak., CA.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA PADA RUMAH SAKIT BERSTATUS BADAN LAYANAN UMUM (Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 16 September 2016 s/d 16 Desember 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

IDA BAGUS MADE CAHYA
RESTU AJI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 27 September 2016
Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Dra. CHRISTY DEWIYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan DIY
3. Dir. Rumah Sakit Jogja Kota Yogyakarta
4. Ybs.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Wirosaban No 1 Yogyakarta Kode Pos : 55162 Telp. (0274)371195, Fax.(0274)385769
E-MAIL : rsud@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227880001 HOTLINE E-MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT IJIN PENELITIAN

No. 070 / 4701

Dengan ini Direktur RSUD Kota Yogyakarta memberikan ijin kepada :

Nama : Ida Bagus Made Cahya Restu Aji
NIM : 12812144044
Institusi : Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul :
"Analisis Penerapan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta)".
Waktu : 30 September s/d 30 Desember 2016
Dengan ketentuan : 1. Wajib mengikuti tata tertib yang berlaku.
2. Setelah selesai agar menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk *hardcopy* dan CD kepada RSUD Kota Yogyakarta.

Kepada semua pihak agar dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian surat ijin ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, September 2016

DIREKTUR



drg. Hj. RR. Tuty Setyowati, MM
NIP. 196205021987012001



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN 2

PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA

Pedoman Wawancara Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi

1. Mohon sebutkan dan jelaskan secara rinci format pelaporan keuangan yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta
2. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengklasifikasikan aktiva dan kewajiban dalam pelaporan keuangannya? Mohon dijelaskan secara rinci
3. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengklasifikasikan aktiva bersih terikat atau tidak terikat dalam pelaporan keuangannya? Mohon dijelaskan secara rinci
4. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mencatat perubahan kelompok aktiva bersih? Mohon dijelaskan secara rinci
5. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengklasifikasikan Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian pada pelaporan keuangannya? Mohon dijelaskan secara rinci
6. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mencatat informasi atas pendapatan dan beban? Mohon dijelaskan secara rinci
7. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mencatat informasi atas pemberian jasa? Mohon dijelaskan secara rinci
8. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran kas? Mohon dijelaskan secara rinci
9. Adakah hambatan pada penerapan penyajian laporan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta? Jika ada mohon dijabarkan dan berikan penjelasan apakah sudah teratasi atau belum

Hasil Wawancara Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi

1. Mohon sebutkan dan jelaskan secara rinci format pelaporan keuangan yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta

Jawab : Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta menggunakan dua sistem akuntansi, yaitu sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Kalau sebagai entitas akuntansi, kami hanya melakukan pencatatan tapi tidak menerbitkan laporan keuangan sendiri, jadi yang menerbitkan laporan keuangan itu di Pemerintah Kota, kami hanya mengkonsolidasikan semua laporan atau pencatatan ke sana. Kalau sebagai entitas pelaporan, jadi kami menerbitkan laporan keuangan sendiri, yaitu terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengklasifikasikan aktiva dan kewajiban dalam pelaporan keuangannya? Mohon dijelaskan secara rinci

Jawab : Karena kita menggunakan dua sistem tadi maka kerjaan kita double, maka dari itu agar dapat mengefisienkan tenaga SDM, kami tetap memakai akun-akun yang sama antara yang kita gunakan untuk dilaporkan ke Pemerintah Kota (sebagai entitas akuntansi) maupun pelaporan yang kami terbitkan sendiri (sebagai entitas pelaporan). Coba nanti dilihat di laporan

keuangannya akun-akun tersebut. Sepertinya hanya berbeda di sisi ekuitasnya.

3. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengklasifikasikan aktiva bersih terikat atau tidak terikat dalam pelaporan keuangannya? Mohon dijelaskan secara rinci

Jawab : Kalau dalam hal ini kami belum mengklasifikasikannya ke dalam aktiva bersih terikat atau tidak terikat, karena seluruh pencatatan kami klasifikasikan ke dalam ekuitas tidak terikat. Di samping itu, dalam kasus laporan keuangan kami ini, khususnya laporan keuangan Rumah Sakit sepertinya tidak ada akun transaksi yang dapat mengisi pos ekuitas terikat permanen maupun temporer.

4. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mencatat perubahan kelompok aktiva bersih? Mohon dijelaskan secara rinci

Jawab : Sama seperti tadi saya jelaskan, kami belum mengklasifikasikan ke dalam aktiva bersih terikat permanen maupun temporer dan aktiva bersih tidak terikat.

5. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengklasifikasikan Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian pada pelaporan keuangannya? Mohon dijelaskan secara rinci

Jawab : Kalau klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian itu kita catat di laporan operasinal.

6. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mencatat informasi atas pendapatan dan beban? Mohon dijelaskan secara rinci

Jawab : Jadi kita mencatat pendapatan di laporan operasional sebagai penambah ekuitas dan sebaliknya biaya sebagai pengurang.

7. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mencatat informasi atas pemberian jasa? Mohon dijelaskan secara rinci

Jawab : Kalau informasi pemberian jasa, kita mencatatnya sebagai biaya yang kita keluarkan, jadi ada biaya operasional dan non operasional, dan itu dicatat di laporan operasional. Nanti rincian dari biaya itu juga ada di catatan atas laporan keuangan.

8. Bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran kas? Mohon dijelaskan secara rinci

Jawab : Ya sudah jelas kita catat di laporan arus kas, rinciannya juga ada di catatan atas laporan keuangan.

9. Adakah hambatan pada penerapan penyajian laporan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta? Jika ada mohon dijabarkan dan berikan penjelasan apakah sudah teratasi atau belum

Jawab : Yang jelas tenaga SDM. Kalau masalah pengetahuan dan kemampuan penyusunan laporan keuangan tidak ada masalah. Hanya saja dengan SDM yang terbatas beban pekerjaan dirasa berat.

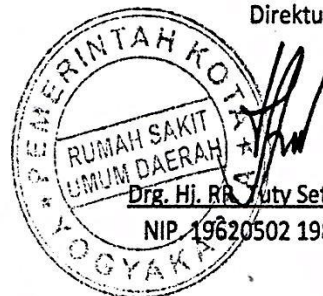
LAMPIRAN 3
LAPORAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014

No	Uraian	Tahun 2014
	ASET	
	Aset Lancar	
	Kas dan Setara Kas	35.316.919.052,26
	Investasi Jangka Pendek	-
	Piutang Usaha	2.694.773.563,00
	Piutang Lain-lain	-
	Penyisihan Kerugian Piutang	(444.781.769,00)
	- Persediaan	4.868.184.480,00
	Uang Muka	-
	Biaya Dibayar Di Muka	-
	Jumlah Aset Lancar	42.435.095.326,26
	Investasi Jangka Panjang	-
	Aset Tetap	
	Tanah	-
	Gedung dan Bangunan	10.355.877.244,75
	Peralatan dan Mesin	28.830.684.708,63
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	247.222.290,00
	Aset Tetap lainnya	23.990.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Jumlah Aset Tetap	39.457.774.243,38
	Akumulasi Penyusutan	(22.189.348.281,00)
	Nilai Buku Aset Tetap	17.268.425.962,38
	Aset Lainnya	
	Aset Kerjasama Operasi	-
	Aset Sewa Guna Usaha	-
	Aset Tak Berwujud	423.547.067,00
	Aset Lain-lain	-
	Jumlah Aset Lainnya	423.547.067,00
	JUMLAH ASET	60.127.068.355,64

No	Uraian	Tahun 2014
	KEWAJIBAN	
	Kewajiban Lancar	
	Utang Usaha	617.775.351,00
	Utang Pajak	-
	Biaya yang Masih Harus Dibayar	1.521.763.837,00
	Pendapatan diterima Di Muka	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-
	Utang Bunga	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-
	Jumlah kewajiban Lancar	2.139.539.188,00
	Kewajiban Jangka Panjang	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	2.139.539.188,00
	EKUITAS	
	Ekuitas Tidak Terikat	
	Ekuitas Awal	18.515.554.008,00
	Surplus & Defisit Tahun Lalu	22.520.374.437,93
	Surplus & Defisit Tahun Berjalan	16.951.600.721,71
	Ekuitas Donasi	-
	Ekuitas Terikat Temporer	-
	Ekuitas Terikat Permanen	-
	JUMLAH EKUITAS	57.987.529.167,64
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	60.127.068.355,64

Yogyakarta, Januari 2015
Direktur



Drg. Hj. R.R. Setyowati, MM
NIP. 19620502 198701 2 001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

No	Uraian	Tahun 2014
A.	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	68.410.719.592,26
	Hibah	-
	Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	87.168.500,00
	APBD	20.187.266.973,45
	APBN	-
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	1.578.304.816,00
	Jumlah Pendapatan	90.263.459.881,71
B.	BIAYA OPERASIONAL	
	1. Biaya Pelayanan	
	a. Pegawai	2.339.512.071,00
	b. Bahan	22.876.454.454,00
	c. Jasa Pelayanan	19.278.749.437,00
	d. Pemeliharaan	334.276.088,00
	e. Barang dan Jasa	543.077.055,00
	f. Penyusutan Aset Tetap	-
	g. Pelayanan Lainnya	-
	Jumlah Biaya Pelayanan	45.372.069.105,00
	2. Biaya Umum & Administrasi	
	a. Pegawai	19.406.265.907,00
	b. Administrasi Kantor	691.947.894,00
	c. Pemeliharaan	1.158.315.241,00
	d. Barang dan Jasa	2.881.368.799,00
	e. Promosi	108.039.001,00
	f. Penyusutan Aset Tetap	3.487.910.730,00
	g. Umum dan Adm Lainnya	205.942.483,00
	Jumlah Biaya Umum & Administrasi	27.939.790.055,00
	Jumlah Biaya Operasional	73.311.859.160,00
	Surplus (Defisit) Setelah Biaya Operasional	16.951.600.721,71
	Pendapatan Non Operasional	-
	Biaya Non Operasional	-
	Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Bersih	16.951.600.721,71

Yogyakarta, Januari 2015

Direktur



Drg. Hj. Rikky Setyowati, MM
NIP. 19620502 198701 2 001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

No	Uraian	Tahun 2014
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
	Arus Kas Masuk :	
	Jasa layanan	67.090.921.220,26
	Hibah	-
	Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	87.168.500,00
	Pendapatan APBD	20.144.518.640,00
	Pendapatan APBN	-
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.578.304.816,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	88.900.913.176,26
	Arus Kas Keluar :	
	Biaya Operasional	
	Biaya Layanan	44.555.676.650,00
	Biaya Umum & Administrasi	24.285.783.924,00
	Biaya Non Operasional	-
	Jumlah Arus Kas Keluar	68.841.460.574,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	20.059.452.602,26
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
	Arus Kas Masuk :	
	Hasil Penjualan Aset Tetap	
	Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang	
	Hasil Penjualan Aset Lainnya	
	Jumlah Arus Kas Masuk	-
	Arus Kas Keluar :	
	Perolehan Aset Tetap	4.081.461.317,00
	Perolehan Investasi Jangka Panjang	
	Perolehan Aset Lainnya	73.181.425,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	4.154.642.742,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(4.154.642.742,00)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
	Arus Kas Masuk :	
	Perolehan Pinjaman	
	Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman	
	Jumlah Arus Kas Masuk	-
	Arus Kas Keluar :	
	Pembayaran Pokok Pinjaman	
	Pemberian Pinjaman	
	Jumlah Arus Kas Keluar	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-
	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	15.904.809.860,26
	Kas dan Setara Kas Awal	19.412.109.192,00
	Jumlah Saldo Kas Akhir Tahun	35.316.919.052,26

Yogyakarta, Januari 2015
Direktur

Dr. H. R. Tuty Setyowati, MM
NIP. 19620502 198701 2 001 4/



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Pendahuluan

a. Sejarah pembentukan BLUD;

Sejarah berdirinya RSUD Kota Yogyakarta bermula dari usulan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengembangan Klinik Bersalin Trisnowati menjadi RSUD Kelas D dengan nomor: 165/Kanwil/Proy RSU/1982 tanggal 14 Juli 1982.

Pada tahun 1985 diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 88/Id2/KPTS/1985 tanggal 28 Agustus 1985 tentang Pemberian ijin lokasi dan ijin pembebasan tanah untuk proyek pengembangan RSU Prop/Kab/Kodya DIY Kanwil Dep. Kes Prop DIY untuk membebaskan tanah milik penduduk seluas 1,5 ha yang terletak di Jalan Wirosaban Kecamatan Umbulharjo Kotamadya Yogyakarta untuk pembangunan RSU Kelas C. Realisasi pelaksanaan pembebasan tanah milik penduduk TA 1984/1985 dengan sumber dana APBN, sedang realisasi pelaksanaan pembangunan tahap I berupa pembangunan gedung poliklinik dan UGD seluas 720 m2 dengan sumber dana dari APBD TK I TA. 1985/1986.

Pada 18 Desember 1986 diterima surat pemberitahuan dari Departemen Kesehatan RI bahwa RSUD Kotamadya Yogyakarta telah terdaftar pada Departemen Kesehatan dengan nomor kode: 3471234 (Dirjen Yan Med nomor 2676/Yan Med/Info/86 tanggal 12 Desember 1986).

Selanjutnya pada 3 Februari 1987 diajukan surat permohonan kepada Bapak Walikota Yogyakarta untuk pemanfaatan gedung poliklinik dan UGD yang telah tersedia di lokasi Jalan Wirosaban Nomor 1 Yogyakarta, dan pada bulan Oktober 1987 Rumah Sakit Umum Kotamadya Yogyakarta memulai kegiatan operasionalnya dengan mengambil lokasi di Gedung Trisnowati dan sebagian dari Puskesmas Mergangsari Yogyakarta. Tahap pertama kegiatan operasionalnya RSUD Kotamadya Yogyakarta memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. UPF Rawat Jalan : Poliklinik Umum, Gigi dan Mulut, PKBRS, dan Laboratorium.

2. UPF Rawat Nginap : Pelayanan Persalinan dan operasi kecil (MOW).

Perkembangan selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 1987 diajukan surat permohonan legalisasi pelaksanaan kegiatan RSUD Kotamadya Yogyakarta kepada Bapak Walikota Yogyakarta, dan pada tanggal 1 Oktober 1987 diterbitkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Dati II Yogyakarta sebagai berikut:

1. SK Nomor 445/1725 tentang dimulainya kegiatan operasional RSUD Kotamadya Yogyakarta dengan mengambil lokasi di Gedung Klinik Bersalin Trisnowati dan sebagian di Puskesmas Mergangsari.

2. SK Nomor 445/1728 tentang susunan personalia yang menjalankan tugas pada RSUD Kelas C Kotamadya Yogyakarta.

Berdasarkan SK. Menteri Kesehatan RI Nomor 496/Menkes/SK/V/1994 RSUD Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai RSUD Kelas C milik Pemerintah Kota Yogyakarta, dan selanjutnya dalam Perda Nomor 1 Tahun 1996 dikukuhkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit. RSUD Kota Yogyakarta ditetapkan menjadi Rumah Sakit Klas B pada tanggal 28 Nopember 2007 dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1214/ MENKES/SK/XI/2007.

b. Dasar hukum pembentukan BLUD;

RSUD Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai BLUD dengan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423/KEP/2007. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

c. Alamat kantor BLUD, unit vertikal BLUD, dan unit usaha BLUD;

Jl. Wirosaban No. 1 Yogyakarta.

d. Keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama BLUD;

RSUD Kota Yogyakarta sebagai salah satu unsur pelayanan kesehatan bagi masyarakat dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanannya, salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Disamping itu RSUD Kota Yogyakarta harus tetap melaksanakan fungsi sosial melalui program-program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

RSUD mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan pelaksanaan rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dalam uraian di atas, Rumah Sakit Jogja mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan pelayanan medis paripurna;
2. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
3. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
5. menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
6. menyelenggarakan pelayanan penelitian dan pengembangan;
7. menyelenggarakan pelayanan administrasi dan keuangan rumah sakit;
8. menyelenggarakan pelayanan administrasi dan keuangan rumah sakit.

e. Nama pejabat pengelola dan dewan pengawas BLUD;

1. Susunan Direksi

Direktur : drg. Hj. Rr. Tuty Setyowati, MM
(No. 83/Pem.D/BP/D.4 tertanggal 12 September 2013)
Wadir Umum dan Keuangan : Dra. Ratna Yuni Utari
(No. 7/Pem.D/BP/D.4 tertanggal 3 Januari 2009)
Wadir Pelayanan : Agus Sudrajat, SKM. M.Kes
(No. 39/Pem.D/BP/D.4 tertanggal 17 April 2013)

2. Susunan Dewan Pengawas

Ketua : Dra. M.K. Pontjosiwi W
Anggota : dr. Jarir Aat Thobari, D.Pharm., Ph.D
Yos Hendra, S.E., Ak., M.M.
Sekretaris : Alb. Widiawan Heri P, SS, MPH

f. Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan. 587 karyawan.

2. Kebijakan Akuntansi

1) Asumsi Dasar

Asumsi dasar akuntansi yang diterapkan pada sistem akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut:

(1) Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi Rumah Sakit Umum Daerah akan terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk menghentikan usahanya.

(2) Dasar Akuntansi Akruai

Laporan keuangan pada prinsipnya disusun atas dasar akrual, yaitu mengakui transaksi pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam periode bersangkutan. Hal ini memberikan informasi kepada pembaca laporan keuangan tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan kas dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa mendatang serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa yang akan datang.

Namun demikian untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Rumah Sakit Umum Daerah mengacu kepada dasar akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang menggunakan dasar kas, yaitu mengakui pendapatan daerah pada saat kas diterima dan belanja daerah diakui pada saat diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

(3) Entitas Akuntansi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, pasal 15 disebutkan bahwa RSUD adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit, yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(4) Ciri Dasar Akuntansi

Akuntansi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan bagian dari akuntansi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, karena kekayaan Rumah Sakit Umum Daerah bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dengan ciri yang berbeda dengan akuntansi satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu :

- Dalam rangka pengelolaan kas Rumah Sakit Umum Daerah dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke kas daerah. Rumah Sakit Umum Daerah juga dapat menyimpan dan mengelola rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh dana tambahan.
- Rumah Sakit Umum Daerah diperbolehkan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan puskesmas.
- Akuntansi dan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh IAI.
- Pada saat konsolidasi ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah disusun menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2) Kebijakan Akuntansi Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset lancar terdiri atas : kas dan bank, deposito, piutang, persediaan.

Aset tetap adalah Aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pelayanan publik dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Aset lain-lain adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset lancar, investasi jangka panjang, Aset tetap dan dana cadangan.

3) Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus ditunasi

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul

4) Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah Aset dengan jumlah Kewajiban.

5) Kebijakan Akuntansi Hibah Terikat

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat / badan lain dengan tujuan untuk pembiayaan operasional tertentu misalnya khusus menanggulangi penyakit HIV/AIDS. Hibah tipe ini dicatat pada Neraca Dana Hibah Terikat sampai dengan pembiayaan operasional tertentu tersebut dilaksanakan.

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat / badan lain dengan tujuan perolehan Aset tetap, misalnya pendonor menyumbangkan dana tetapi khusus untuk membeli Aset tertentu, maka dicatat pada Neraca Dana Hibah Terikat

6) Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan Aset dan atau penurunan Kewajiban yang berasal dari berbagai kegiatan periode berjalan akuntansi tertentu

Pendapatan diakui pada saat kejadian (transaksi) bukan pada saat kas atau setara kas diterima dan dicatat dalam periode bersangkutan sebesar jumlah pendapatan yang telah menjadi hak.

Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran)

7) Kebijakan Akuntansi Biaya

Berdasarkan sumber dananya biaya diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya yang sumber dananya dari pendapatan operasional rumah sakit dan biaya yang sumber dananya berasal dari alokasi dana pemerintah kota.

Biaya terdiri dari: biaya operasional dan biaya non operasional sedangkan biaya operasional terdiri dari biaya pelayanan dan biaya administrasi dan umum

3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

1) Penjelasan atas pos-pos neraca

(1) Aset

a. Kas dan Setara Kas	Rp	35.316.919.052,26
Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2014, terdiri dari:		
- Kas di Bendahara	Rp	4.980,00
- Kas di rekening Bank	Rp	2.316.914.072,26
- Deposito	Rp	33.000.000.000,00
Jumlah	Rp	35.316.919.052,26
b. Investasi Jangka Pendek	Rp	-
Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2014		
c. Piutang Usaha	Rp	2.694.773.563,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Usaha per 31 Desember 2014, terdiri dari:		
- Piutang Pasien	Rp	961.861.449,00
- Piutang Jaminan/Klaim :		
- In Health	Rp	2.180.366,00
- BPJS	Rp	1.049.561.435,00
- Jamkesda Kota Yogyakarta	Rp	132.582.756,00
- Jamkesda Bantul	Rp	136.740.340,00
- Jamkesda Gunung Kidul	Rp	75.249.723,00
- Jamkesos	Rp	1.701.337,00
- JPKM Sleman	Rp	140.600.606,00
- MOU	Rp	194.295.551,00
Jumlah	Rp	2.694.773.563,00
Ditinjau dari umur piutang dapat dirinci sebagai berikut:		
- Kurang dari 1 tahun	Rp	1.934.632.353,00
- 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Rp	141.036.417,00
- 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Rp	419.164.257,00
- Lebih dari 5 tahun	Rp	199.940.536,00
Jumlah	Rp	2.694.773.563,00
d. Piutang Lain-lain	Rp	-
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2014		
e. Penyisihan Kerugian Piutang	Rp	444.781.769,00
f. Persediaan	Rp	4.868.184.480,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2014, terdiri dari :		
- Persediaan Obat-obatan	Rp	3.723.817.033,00
- Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	31.525.060,00
- Persediaan Barang Cetak	Rp	259.493.620,00
- Persediaan Sarana Kebersihan	Rp	8.721.527,00
- Persediaan Bahan Sarana Listrik/Air	Rp	25.380.400,00
- Persediaan Bahan Makanan	Rp	813.900,00
- Persediaan Linen	Rp	818.432.940,00
Jumlah	Rp	4.868.184.480,00
g. Uang Muka	Rp	-
Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Muka per 31 Desember 2014		
h. Biaya Dibayar di Muka	Rp	-
Jumlah tersebut merupakan saldo Biaya dibayar di muka per 31 Desember 2014		
i. Aset Tetap	Rp	17.268.425.962,38
Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2014, terdiri dari :		
- Tanah	Rp	-
- Gedung dan bangunan	Rp	10.355.877.244,75
- Peralatan dan mesin	Rp	28.830.684.708,63
- Jalan, Irigasi, dan jaringan	Rp	247.222.290,00
- Aset tetap lainnya	Rp	23.990.000,00
- Konstruksi dalam pengerjaan	Rp	-
Nilai Perolehan	Rp	39.457.774.243,38
Akumulasi Penyusutan	Rp	(22.189.348.281,00)
Nilai Buku	Rp	17.268.425.962,38
Aset Tetap sebesar Rp 14.341.819.800 dari Rp 17.268.425.962,38 belum ada Berita Acara Serah Terima Barang.		
1. Dana Dekonsentrasi, yang terdiri dari :		
- Peralatan dan Mesin	Rp	1.591.544.000,00
- Gedung dan Bangunan	Rp	1.599.009.000,00
- Jalan Jaringan dan Irigasi	Rp	6.000.000,00
- Aset tak Berwujud	Rp	15.000.000,00
	Rp	3.211.553.000,00

2. Dana Tugas Pembantuan, yang terdiri dari :		
- Peralatan dan Mesin	Rp	9.639.142.800,00
- Gedung dan Bangunan	Rp	1.491.124.000,00
	Rp	11.130.266.800,00
j. Aset Lainnya		Rp 423.547.067,00
Jumlah tersebut merupakan Aset Lainnya per 31 Desember 2014, terdiri dari :		
- Aset kerja sama operasi	Rp	-
- Aset sewa guna usaha;	Rp	-
- Aset tak berwujud;	Rp	423.547.067,00
- Aset lain-lain.	Rp	-
	Jumlah	Rp 423.547.067,00
(2) Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek		Rp 2.139.539.188,00
Jumlah tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014, terdiri dari :		
- Utang Usaha	Rp	617.775.351,00
- Utang Pajak	Rp	-
- Biaya yang masih Harus Dibayar	Rp	1.521.763.837,00
- Pendapatan Diterima Dimuka,	Rp	-
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp	-
- Utang Bunga	Rp	-
- Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	-
	Jumlah	Rp 2.139.539.188,00
Kewajiban Jangka Panjang.		Rp -
Jumlah tersebut merupakan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2014		
(3) Ekuitas		
Ekuitas		Rp 57.987.529.167,64
Ekuitas BLUD diklasifikasikan menjadi:		
a. Ekuitas Tidak Terikat, yang terdiri atas:		
- Ekuitas awal	Rp	18.515.554.008,00
- Surplus & defisit tahun lalu	Rp	22.520.374.437,93
- Surplus & defisit tahun berjalan	Rp	16.951.600.721,71
- Ekuitas donasi	Rp	-
b. Ekuitas Terikat		
- Ekuitas Terikat Temporer	Rp	-
- Ekuitas Terikat Permanen	Rp	-
	Jumlah	Rp 57.987.529.167,64
2) Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional		
Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, terdiri dari :		
a. Pendapatan		
a) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan		Rp 68.410.719.592,26
Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan Usaha dari Jasa Layanan per 31 Desember 2014, yang terdiri dari:		
- Pendapatan Rawat Jalan	Rp	11.613.424.592,94
- Pendapatan Rawat Inap	Rp	14.356.157.118,30
- Pendapatan Obat-Obatan	Rp	26.756.305.079,91
- Pendapatan Laboratorium	Rp	3.838.674.310,05
- Pendapatan Radiologi	Rp	1.067.433.492,34
- Pendapatan Ambulance	Rp	89.110.423,32
- Pendapatan Fisioterapi	Rp	1.313.365.257,34
- Pendapatan Perawatan Jenazah	Rp	128.919.912,68
- Pendapatan Instalasi Bedah Sentral	Rp	6.323.963.560,89
- Pendapatan Instalasi Bank Darah	Rp	1.603.205.972,51
- Pendapatan Klaim tahun 2014 yang belum dibayar	Rp	1.320.159.872,00
	Jumlah	Rp 68.410.719.592,26
b) Hibah terikat dan tidak terikat;		Rp -
Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan hibah per 31 Desember 2014		
c) Hasil kerjasama dengan pihak lain		Rp 87.168.500,00
Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain per 31 Desember 2014		
c) Pendapatan dari APBD		Rp 20.187.266.973,45
Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan dari APBD per 31 Desember 2014		
d) Pendapatan dari APBN		Rp -
Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan dari APBN per 31 Desember 2014		

e) Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	1.578.304.816,00
Jumlah tersebut merupakan jumlah pendapatan Usaha Lainnya per 31 Desember 2014, yang terdiri dari:		
- Diklat	Rp	287.236.500,00
- Incenerator	Rp	-
- Jasa Giro	Rp	98.653.385,00
- Bunga Deposito	Rp	1.170.374.931,00
- Pendapatan Lain-Lain	Rp	22.040.000,00
Jumlah	Rp	1.578.304.816,00
b. Biaya		
a) Biaya Pelayanan	Rp	45.372.069.105,00
Jumlah tersebut merupakan Biaya Pelayanan per 31 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut:		
- Biaya Pegawai	Rp	2.339.512.071,00
- Biaya Bahan	Rp	22.876.454.454,00
- Biaya Jasa Layanan	Rp	19.278.749.437,00
- Biaya Pemeliharaan	Rp	334.276.088,00
- Biaya Barang dan Jasa	Rp	543.077.055,00
- Biaya Penyusutan	Rp	-
- Biaya Pelayanan Lainnya	Rp	-
Jumlah	Rp	45.372.069.105,00
b) Biaya Umum dan Administrasi	Rp	27.939.790.055,00
Jumlah tersebut merupakan Biaya Umum dan Administrasi per 31 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut:		
- Biaya Pegawai	Rp	19.406.265.907,00
- Biaya Adm Perkantoran	Rp	691.947.894,00
- Biaya Pemeliharaan	Rp	1.158.315.241,00
- Biaya Barang dan Jasa	Rp	2.881.368.799,00
- Biaya Promosi	Rp	108.039.001,00
- Biaya Penyusutan	Rp	3.487.910.730,00
- Biaya Administrasi Lainnya	Rp	205.942.483,00
Jumlah	Rp	27.939.790.055,00
c) Pendapatan dan Biaya Non Operasional	Rp	-
Jumlah tersebut merupakan pendapatan dan biaya non operasional per 31 Desember 2014, terdiri atas:		
- Pendapatan Non Operasional	Rp	-
- Biaya Non Operasional	Rp	-
Jumlah	Rp	-
3) Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas;		
Komponen-komponen pelaporan arus kas terdiri dari		
(1). Arus kas dari aktivitas operasi, terdiri atas:		
Arus kas masuk	Rp	88.900.913.176,26
Arus kas keluar	Rp	68.841.460.574,00
Arus kas bersih	Rp	20.059.452.602,26
(2). Arus kas dari aktivitas investasi, terdiri atas:		
Arus kas masuk	Rp	-
Arus kas keluar	Rp	4.154.642.742,00
Arus kas bersih	Rp	(4.154.642.742,00)
(3). Arus kas dari aktivitas pendanaan, terdiri atas:		
Arus kas masuk	Rp	-
Arus kas keluar	Rp	-
Arus kas bersih	Rp	-
4) Informasi Tambahan		